



**JENIS-JENIS TINDAK TUTUR DALAM SURAT PERJANJIAN
KERJA: STUDI KASUS DI PERUSAHAAN MINYAK DI
KABUPATEN BOJONEGORO**

Oleh:

Arif Izzak

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**

2014



**JENIS-JENIS TINDAK TUTUR DALAM SURAT PERJANJIAN
KERJA: STUDI KASUS DI PERUSAHAAN MINYAK DI
KABUPATEN BOJONEGORO**

Oleh:

Arif Izzak

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul "*Jenis-Jenis Tindak Tutur Dalam Surat Perjanjian Kerja: Studi Kasus di Perusahaan Minyak di Kabupaten Bojonegoro*".

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur (*speech act*) dalam surat perjanjian kontrak kerja di perusahaan-perusahaan minyak di Bojonegoro' sebagai upaya untuk memperkaya khazanah penelitian pragmatik khususnya tentang tindak tutur.

Penelitian ini tentunya tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Drs. Amir Mahmud, M.Pd., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan karyawan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur atas bantuan dan kerja samanya sehingga laporan penelitian ini bisa diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan hasil penelitian ini. Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah penelitian kebahasaan di Jawa Timur khususnya tentang penelitian Pragmatik.

Sidoarjo, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup.....	6
1.6 Tinjauan Pustaka.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	9
1.7.1 Metode Pengumpulan Data.....	11
1.7.2 Metode Analisis Data.....	13
1.7.3 Metode Penyajian Hasil Analisis Data.....	14
1.8 Kajian Teori.....	15
1.8.1 Pragmatik.....	15
1.8.2 Teori Tindak Tutur.....	18
1.8.2.1 Tindak Tutur Deklarasi.....	21
1.8.2.2 Tindak Tutur Representasi.....	21
1.8.2.3 Tindak Tutur Ekspresif.....	22
1.8.2.4 Tindak Tutur Direktif.....	23
1.8.2.5 Tindak Tutur Komisif.....	23
1.8.3 Konteks dan Situasi Tutur.....	24
1.8.4 Tindak Pengancaman Muka.....	29
1.8.5 Strategi Kesantunan.....	32

BAB II. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Jenis Data.....	40
2.2 Metode Pengumpulan.....	42
2.3 Metode Analisis Data.....	46
2.4 Metode Penyajian Hasil Analisis.....	47
2.5 Metode Penyediaan Data.....	48
2.6 Data Penelitian.....	51

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis dan Pembahasan.....	59
3.2 Jenis-Jenis Tindak Tutur.....	68
3.2.1 TT Deklaratif.....	68
3.2.2 TT Representatif.....	69
3.2.3 TT Asertif-Komisif.....	71
3.2.4 TT Direktif.....	72
3.2.5 TT Komisif.....	74
3.2.6 TT Direktif-Komisif.....	75

3.2.7 TT Asertif-Deklaratif	75
3.2.8 TT Komisif-Deklaratif	76
3.3 Fungsi Tindak Tutur	77

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan.....	79
4.2 Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian studi kasus tentang jenis-jenis tindak tutur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini belum pernah dilakukan di perusahaan minyak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Selama ini kontrak kerja merupakan dokumen yang sangat penting baik bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan atau pegawai karena menyangkut kejelasan nasib para calon pegawai. Penulis ingin mengkaji isi kontrak kerja dari sudut pandang kajian pragmatik khususnya tentang aspek tindak tutur di dalam surat perjanjian kerja tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pragmatik tentang kajian tindak tutur. Kajian tindak tutur pada naskah teks perjanjian kerja antara karyawan/calon karyawan dengan pihak perusahaan merupakan perwujudan dari komunikasi yang bersifat negosiatif antara karyawan dan perusahaan. Sumber data adalah dokumen perjanjian kerja di perusahaan minyak Tri Patra tahun 2012. Karena dokumen kontrak kerja termasuk dokumen yang tidak dibuka untuk umum maka penulis memutuskan untuk menggunakan data hanya pada tahun 2012 dengan pertimbangan lebih mudah memperoleh data pada tahun tersebut.

Hasilnya menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak tutur yang terdapat dalam surat perjanjian kerja adalah jenis tindak tutur **asertif**, **komisif**, **direktif**, **deklaratif**, **asertif-komisif**, **direktif-komisif**, **asertif-deklaratif**, dan **komisif-deklaratif**. Jenis tindak tutur yang paling banyak muncul adalah jenis tindak tutur direktif yang sifatnya adalah imposisi.

Keyword: Pragmatik, Tindak Tutur, Surat Perjanjian Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro saat ini menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah Indonesia karena salah satu andalan pemasukan negara, yakni dari sektor migas berada di kota ini. Cadangan minyak dan gas bumi yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro diperkirakan dapat menjamin pasokan minyak Indonesia sampai beberapa puluh tahun ke depan. Berkah kekayaan dan potensi kandungan minyak yang melimpah di kabupaten yang dulunya akrab dengan banjir ini telah mengubah wajah dan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Perubahan tatanan sosial tersebut terlihat dari adanya perubahan orientasi masyarakatnya dalam hal pekerjaan yang semula berorientasi pada sektor pertanian dan pangan sekarang beralih ke sektor industri migas. Perkembangan industri minyak di Kabupaten Bojonegoro selain memberikan dampak positif juga mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat.

Salah satu dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat adalah dampak sosial dan ekonomi bagi mereka yang tinggal di sekitar sumur minyak. Sebagai contoh, saat ini semakin sedikit masyarakat terutama kalangan generasi mudanya yang mau terjun dalam dunia pertanian untuk menggarap sawah. Disamping itu, semakin banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian utamanya karena tanah dan lahan mereka sudah terjual ke para spekulan tanah yang mengiming-imingi mereka dengan harga yang cukup tinggi.

Orientasi masyarakat terutama kalangan generasi mudanya yang tinggal di sekitar industri minyak telah berubah dari yang semula menggarap sawah pertanian menjadi lebih tertarik untuk bekerja di perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Kabupaen Bojonegoro. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan perubahan orientasi hidup para generasi muda untuk bekerja di perusahaan-perusahaan minyak, salah satunya terkait dengan perjanjian atau kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan minyak tersebut. Perjanjian antara pencari kerja dengan pemberi kerja (perusahaan minyak) dalam bentuk kontrak kerja menjadi sesuatu yang sangat penting baik bagi pencari kerjanya maupun bagi perusahaan yang akan merekrutnya. Kontrak perjanjian kerja tersebut menjadi salah satu isu yang paling populer terutama di kalangan generasi muda di Bojonegoro. Kontrak kerja tersebut sekaligus sebagai media komunikasi antara calon pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. Dalam konteks ini naskah perjanjian kerja secara umum dianggap dan diperlakukan sebagai teks yang dapat dianalisis berdasarkan satuan-satuan bahasanya.

Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan pihak pencari kerja sering menimbulkan masalah karena salah dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam surat perjanjian tersebut. Surat perjanjian kerja merupakan peristiwa tutur (*speech event*) yang berbentuk tulis yang melibatkan partisipan yaitu perusahaan sebagai penutur dan pencari kerja sebagai mitra tutur. Penulis tertarik untuk meneliti jenis-jenis dan fungsi tindak tutur dalam surat perjanjian kerja yang ada di perusahaan-perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro. Ketertarikan penulis terhadap analisis pragmatik tindak tutur dalam kontrak perjanjian kerja disebabkan karena penulis ingin memberikan perspektif baru, sudut pandang baru mengenai kajian naskah perjanjian kerja terutama dari sudut pandang pragmatik tindak tutur.

Sebagai sebuah peristiwa tutur, surat perjanjian kerja semestinya menjadi alat untuk bernegosiasi antarpartisipan dalam sebuah konteks sosial peristiwa tutur (*speech event*) yakni dalam dunia kerja. Perusahaan minyak sebagai pihak yang memerlukan karyawan dan para pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan di perusahaan minyak tersebut. Pada kenyataannya, aspek interaksi dalam konteks ini sangat kurang sehingga mengakibatkan calon karyawan hanya bisa pasrah dan menerima seluruh klausul yang ada di dalam surat perjanjian kerja tersebut. Surat perjanjian kerja yang membuat pihak perusahaan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak perusahaan melalui isi proposisi (*propositional content*) dan daya ilokusi (*illocutionary force*) dalam teks perjanjian kerja untuk kepentingan perusahaan semata.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah inferensi bahwa surat perjanjian kerja sebenarnya merupakan media yang mempertemukan kepentingan para partisipan yang terlibat dalam peristiwa tutur (*speech event*) yang sudah digramatikalisasi (*wording*) dalam bentuk kalimat-kalimat di dalam setiap klausul atau pasal-pasal dokumen surat kontrak kerja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti struktur tindak tutur (*speech act*) dalam surat perjanjian kerja. Penulis memilih perusahaan minyak di Bojonegoro karena saat ini industri minyak sedang berkembang di sana dan banyak perusahaan baru yang bergerak dalam bidang usaha perminyakan.

Penelitian pragmatik pada surat perjanjian kerja menurut penulis penting untuk dilakukan karena selain belum ada penelitian pada objek yang sama, penulis beranggapan bahwa dokumen surat perjanjian kerja ini adalah fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam dunia kerja. Menurut penulis objek apa saja yang berkaitan dengan dinamika kehidupan di masyarakat terutama dalam kaitannya dengan relasi antaranggota masyarakat layak diteliti dari aspek pragmatiknya. Satu-satunya cabang ilmu bahasa yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa di dalam kehidupan sebenarnya dan penggunaannya adalah ilmu pragmatik. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa penelitian pragmatik pada objek dokumen perjanjian kerja, studi kasus di perusahaan minyak di Bojonegoro perlu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Secara khusus surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan pencari kerja telah menjadi hal yang sering memunculkan banyak persoalan di dalam dunia kerja. Di pihak perusahaan perjanjian atau kontrak kerja itu dipakai sebagai alat untuk mendukung kepentingan perusahaan dalam mencapai tujuannya dalam hal ini melalui isi dalam perjanjian tersebut. Surat perjanjian kerja tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tata hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan pihak pencari kerja yang diwujudkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Terkait dengan uraian dalam subbab rumusan masalah, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak tutur yang terdapat dalam surat perjanjian kerja di perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro?
- b. Bagaimanakah fungsi, tujuan, dan aspek pragmatik tindak tutur yang terdapat dalam surat perjanjian kerja di perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 . Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur dalam surat perjanjian kerja di perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Mendeskripsikan fungsi, tujuan, dan konteks pragmatik tindak tutur dalam surat perjanjian kerja di perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 . Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang pragmatik, khususnya kajian tentang tindak tutur (*speech act*) dalam dokumen surat perjanjian kerja di perusahaan minyak di Bojonegoro. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak perusahaan, yang menyusun surat perjanjian kerja, dan bagi pihak pencari kerja. Dengan demikian, diharapkan nanti tidak ada lagi masalah yang terkait dengan perbedaan dalam penafsiran isi dari surat perjanjian kerja tersebut.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Penelitian ini difokuskan pada dua hal yaitu kajian tentang bentuk atau jenis-jenis tindak tutur (*speech act*) yang terdapat dalam dokumen surat perjanjian kerja mulai tahun 2012 di perusahaan minyak Tri Patra di Kabupaten Bojonegoro dan deskripsi fungsi masing-masing jenis tindak tutur. Penulis ingin mengetahui dan mengidentifikasi struktur surat perjanjian kerja dari perspektif kajian tindak tutur (*speech act*).

Penulis membatasi pokok bahasan hanya tentang tindak tutur (*speech act*) dalam sebuah peristiwa tutur (*speech event*) untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas karena kajian pragmatik memiliki keterkaitan dengan kajian-kajian lainnya misalnya dengan semantic selain juga karena banyaknya sub pokok bahasan pragmatic misalnya implikatur, perikutan, aspek kesopanan, dan sebagainya.

Penulis membatasi pokok kajian pada aspek tindak tutur dan peristiwa tutur karena kajian pragmatik sangat luas sehingga tidak mungkin penulis akan mengkaji semua aspek tersebut. Terlebih lagi penulis ingin fokus pada pokok bahasan tindak tutur dan peristiwa tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja di perusahaan minyak Tri Patra pada tahun 2012.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian dalam bidang pragmatik sudah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian kebahasaan. Kajian pragmatik penting dilakukan karena saat ini semakin banyak data-data empirik di lapangan yang memerlukan kajian pragmatic. Gagalnya masyarakat menangkap pesan dan maksud yang disampaikan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dan sering terjadinya kesalahpahaman misalnya antara perusahaan dengan pihak karyawan adalah salah satu contoh empirik kurangnya kompetensi pragmatik masyarakat.

Seperti kita ketahui bahwa fenomena bahasa tidak pernah terlepas dari fenomena sosial masyarakat bahasa penggunaannya. Bahasa senantiasa berada di bawah sistem yang lebih besar yaitu sistem budaya di dalam masyarakat penuturnya. Dengan demikian peristiwa kebahasaan tidak pernah terlepas dari dinamika perkembangan sosial masyarakat baik dalam aspek ideologi, agama, dan sistem tata nilai yang dianut oleh masyarakat penuturnya.

Berdasarkan kajian literatur yang sudah dilakukan penulis, selama ini belum ada penelitian yang mengkaji khusus tentang aspek tindak tutur dalam perspektif pragmatik pada objek teks dokumen surat perjanjian kerja. Objek teks

dokumen yang bersifat legal formal tersebut lebih banyak diteliti dengan menggunakan ancangan penelitian analisis wacana (*discourse analysis*) alih-alih dalam perspektif pragmatik. Menurut hemat penulis, tidak adanya penelitian pragmatik yang khusus mengambil objek dokumen resmi perjanjian kerja karena masih ada perdebatan apakah teks dalam dokumen surat perjanjian kerja dapat dikategorikan sebagai tindak tutur (*speech act*). Dengan kata lain masih ada yang memaknai tindak tutur sebagai tindak wicara lisan.

Terkait dengan penelitian tindak tutur, Utami pernah melakukannya pada tahun 2011 yakni mengenai tingkat tutur (*undha usuk* dalam bahasa Jawa) dan tindak tutur pada sebuah film berbahasa Perancis. Dia meneliti tentang bentuk dan fungsi tingkat tutur dan tindak tutur dalam film berbahasa Perancis tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya fungsi tindak tutur direktif, fungsi tindak tutur ekspresif dan fungsi tindak tutur komisif. Fungsi tindak tutur direktif meliputi fungsi meminta, bertanya, memerintah, melarang, menyetujui, dan menasehati. Sedangkan fungsi tindak tutur ekspresif meliputi fungsi tuturan salam, permintaan maaf, penyesalan, terimakasih, ucapan selamat dan fungsi belarasa. Fungsi tindak tutur komisif meliputi fungsi tuturan berjanji dan menawarkan.

Perbedaan fundamental penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Utami adalah pada sifat data yang menjadi objek kajiannya. Data penelitian Utami bersifat natural (interaksi langsung) meskipun rekaan (*fictional*) yaitu percakapan dalam sebuah film sedangkan data penelitian ini berupa teks dokumen surat perjanjian kerja yang bersifat legal formal (interaksi tidak langsung). Perbedaan lainnya adalah Utami meneliti tindak tutur lisan sedangkan

penelitian ini mengkaji tindak tutur pada naskah tulis yakni pada dokumen surat perjanjian kerja di perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja dan fungsi tindak tutur tersebut dalam surat perjanjian kerja. berdasarkan tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis memerikan dan menjelaskan dengan menggunakan kata-kata dan kalau perlu menggunakan diagram untuk menemukan kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian yang dimaksud. Penelitian ini bersifat induktif yaitu penelitian yang berangkat dari data yang telah dikumpulkan penulis. Kesimpulan selanjutnya diambil berdasarkan analisis data yang diperoleh di lapangan.

Denzin dan Lincoln 1987 (dalam Moleong 2006) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada antara lain dengan metode wawancara, dengan pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dengan kata lain penelitian ini didasarkan pada dua aspek dasar yaitu penelitian yang bersifat naturalistik dan tujuannya adalah untuk memahami sebuah fenomena kebahasaan tertentu dan dalam konteks tertentu (Moleong, 2006: 5—6).

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini secara umum terdiri atas tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Metode yang digunakan dalam tahap pengumpulan data adalah metode simak dengan teknik dasar sadap. Mahsun (2007: 92) mengatakan bahwa pada dasarnya metode simak dalam sebuah penelitian adalah melakukan penyadapan terhadap penggunaan bahasa oleh informan. Mahsun juga menambahkan bahwa penyadapan tidak hanya dilakukan terhadap bahasa-bahasa lisan tetapi termasuk juga bahasa tulis. Oleh karena itu metode simak dengan teknik sadap ini diikuti oleh teknik catat dan rekam. Seluruh data yang diperoleh dicatat dan direkam baik dengan menggunakan buku catatan maupun dengan alat rekam (*recorder*).

Pada tahap analisis data, penulis menggunakan metode distribusional atau metode agih. Metode distribusional adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari bahasa yang diteliti (Sudaryanto dalam Kesuma, 2007: 54). Kesuma (2007: 55) menyatakan bahwa metode agih ini terdiri atas teknik dasar yaitu teknik bagi unsur langsung dan sebelas teknik lanjutan. Tidak semua teknik lanjutan digunakan, hanya yang berhubungan dengan teknik pemilahan unsur kalimat yang memuat verba tindak tutur yang akan digunakan yaitu perpaduan antara teknik ganti, perluas, dan teknik baca markah.

Selanjutnya penulis memilah data, mengkategorikan data, dan dilanjutkan dengan menganalisis dan melakukan interpretasi data. Data dianalisis secara deskriptif sebagai konsekuensi dari metode penelitian kualitatif yakni penelitian dengan data-data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Sumber data diperoleh dari dokumen surat perjanjian kerja tahun 2012 sementara satuan lingual verba tindak tutur yang terdapat di dalam teks dokumen merupakan satuan lingual yang dianalisis.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata yang bersumber dari sumber data tertulis yakni dari dokumen surat perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah berupa dokumen surat perjanjian kerja tahun 2012 di perusahaan minyak Tri Patra, Kabupaten Bojonegoro. Peneliti dalam penelitian ini juga sekaligus bertindak sebagai instrumen pengumpul data penelitian itu sendiri karena peneliti mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data baik melalui teknik rekam, catat, maupun dengan melakukan wawancara dengan informan. Sugiyono (2009: 305) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Richards dan Schmidt dalam *Dictionary of Language Teaching And Applied Linguistics* (ed. 3, 2002) mendefinisikan metode ini sebagai berikut:

”Triangulation (in qualitative research), the process of collecting data from several different sources or in different ways in order to provide a fuller understanding of a phenomenon. Obtaining data from more than one source (e.g. interviews, observations, and documents) is the most commonly used type of triangulation. Triangulation may also involve using multiple methods (e.g. from interviews, questionnaires, observation schedules, test scores, etc.), multiple researchers (i.e. the

use of more than one researcher in a study), or multiple theories for the interpretation of data.

Pada dasarnya teknik penyediaan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling*. Seperti telah disebutkan sebelumnya teknik *sampling* yang digunakan adalah *sampling* bertujuan (*purposive sampling*). Maksud dari penggunaan teknik *sampling* bertujuan ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber data dan bangunannya (*construction*) (Moleong, 2006: 224). Berikut ciri-ciri sampel bertujuan seperti yang diutarakan Moleong:

1. Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.
2. Pemilihan sampel secara berurutan: Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sample dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat diperbandingkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Dari mana ia ditarik atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah berjalan maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan peneliti. Dalam kasus seperti ini teknik *sampling* bola salju (*snow ball*) dapat bermanfaat.
3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun demikian semakin banyak informasi

yang diperoleh dari data semakin fokus pula pada objek yang sedang diteliti.

Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan.

Penelitian ini menggunakan data pada dokumen resmi surat perjanjian kerja tahun 2012. Pemilihan dokumen tahun 2012 oleh penulis didasarkan pada kepentingan pragmatis penulis hanya memiliki akses pada dokumen perjanjian kerja tahun 2012 tersebut. karena teks dalam surat perjanjian kerja sama untuk seluruh karyawan perusahaan dan redaksionalnya tetap maka penulis memutuskan untuk menggunakan hanya satu dokumen yakni dokumen tahun 2012. Menurut Sapsford & Jupp (2006) keuntungan menggunakan sumber data dari dokumen tertulis adalah dokumen ini tersedia banyak sekali di instansi-instansi atau kepemilikan pribadi.

1.7.2 Metode Analisis Data

Seperti telah diuraikan dalam subjudul metode penelitian, analisis data dilakukan dengan metode agih atau distribusional yakni metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari bahasa yang diteliti. Penulis melakukan analisis terhadap satuan kebahasaan dalam hal ini bentuk-bentuk tindak tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja dengan menggunakan teknik dasar bagi unsur langsung maupun dengan teknik lanjutan.

Analisis data dilakukan berdasarkan pada kumpulan data yang sudah didapat untuk selanjutnya dilakukan pemilahan, pengkategorisasian dan kemudian analisis dan interpretasi data. Analisis data tujuannya untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak tutur yang ada dalam dokumen surat perjanjian kerja dan fungsi dari peristiwa tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja.

1.7.3 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode informal. Metode penyajian data secara informal adalah perumusan hasil analisis dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto dalam Kesuma, 2007) yakni pemaparan hasil-hasil analisis data dengan kata-kata yang mudah dan langsung bisa dipahami.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang sifatnya hanya mengidentifikasi dan mengenali bentuk-bentuk tindak tutur dalam dokumen surat perjanjian kontrak kerja sehingga penyajian hasil analisis secara formal tidak diperlukan. Perumusan kaidah dan konsep baru baik dengan menggunakan kata-kata maupun lambang yang menjadi ciri penyajian hasil analisis meskipun dapat juga dijelaskan dalam metode penyajian informal.

Hasil penelitian akan disajikan dengan menggunakan metode informal dan formal (Sudaryanto, 1993). Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan teknik sifatnya, sedangkan penyajian formal adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang.

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga berusaha memerikan bagaimana bentuk-bentuk ungkapan tindak tutur dalam peristiwa tutur dokumen surat perjanjian kerja, selain itu juga disertai penghitungan statistik sederhana untuk menjelaskan analisis kuantitatif. Perhitungan yang bersifat agak kuantitatif hanya untuk memberikan gambaran frekuensi kemunculan dan pemakaian dari masing-masing bentuk tindak tutur.

1.8 Kajian Teori

1.8.1 Pragmatik

Definisi pragmatik menurut Strazny (Ed. 2005) dalam *Encyclopedia of Linguistics Vol. 1* adalah *the study of language use*, 'studi tentang pemakaian bahasa'. Jika dalam kajian tata bahasa (*grammar and structure*) fokus kajiannya berada pada sistem bahasanya, pragmatik mengkaji bagian di luar sistem bahasanya yaitu pilihan-pilihan linguistik penggunaannya di dalam situasi sosial tertentu. Sejalan dengan Strazny, Leech dalam bukunya *Principle of Pragmatics* mengemukakan bahwa Pragmatik adalah studi mengenai makna ujaran di dalam situasi-situasi tertentu (Rustono, 1999: 2). Singkatnya pragmatik mengkaji tentang penggunaan dan pemakaian bahasa oleh penggunaannya dalam situasi dan konteks tertentu.

Definisi pragmatik juga diberikan oleh Black (terjemahan, Davies dan Mitchell: Ed.) bahwa pragmatik adalah kajian terhadap bahasa dalam penggunaannya dengan memperhitungkan unsur-unsur yang tidak dicakup oleh tata bahasa dan semantik) (2011: 2). Dari kedua definisi di atas bisa disimpulkan

bahwa Pragmatik tidak mengkaji sistem bahasanya tetapi pemakaiannya oleh pengguna bahasa tersebut dalam konteks dan situasi sosial tertentu. Masih banyak definisi dari Pragmatik yang dikemukakan para tokoh linguis tetapi sebenarnya memiliki benang merah dan definisi yang penulis anggap bisa mencakup definisi-definisi di atas adalah yang dikemukakan oleh Rustono bahwa Pragmatik adalah bidang linguistik yang mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan (1999: 5).

Dari segi teori kebahasaan Pragmatik dikategorikan sebagai cabang ilmu linguistik baru (Strazny, 2005), "*Pragmatics is a relatively young field of study*" yang dikembangkan dari beberapa pendekatan dari cabang ilmu antara lain filsafat, psikologi, linguistik, dan sosiologi terhadap penggunaan bahasa. Belum ada teori yang khusus untuk Pragmatik kecuali teori-teori yang bersinggungan dengan cabang ilmu lainnya, misalnya dari aspek konteks pemakaian bahasanya digunakan teori komunikasi sosial atau teori sosiologi. Dari aspek maksud penutur '*speakers'/writers' intention*' digunakan teori-teori dalam ilmu psikologi. Dari aspek bentuk bahasanya digunakan teori-teori linguistik.

Selanjutnya Verhaar (2008: 14) mengatakan bahwa Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal 'ekstralingual' yang dibicarakan. Yang menjadi kunci dari penjelasan Verhaar ini adalah 'sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar' dengan kata lain ranah dari kajian pragmatik adalah ranah pemakaian, bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai

alat komunikasi. Dalam konteks komunikasi antara penutur dan pendengar penggunaan bahasa adalah untuk menyampaikan pesan dari penutur kepada pendengar.

Objek yang dikaji dalam Pragmatik adalah hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dan pengguna dari bentuk-bentuk bahasa tersebut. Siapa yang menuturkan, motif dari penutur saat memproduksi tuturan, konteks dan situasi saat tuturan dihasilkan semua adalah wilayah kajian dari Pragmatik.

Kajian pragmatik berbeda dengan kajian Semantik. Selama ini kajian pragmatik dan semantik sama-sama dipandang sebagai kajian tentang makna. Letak perbedaan keduanya adalah semantik mengkaji tentang makna dari kalimat atau ujaran yang dikaitkan dengan bentuk, makna, dan referen dari kalimat atau ujaran itu. Sedangkan pragmatik mengkaji makna yang dimaksudkan oleh penuturnya sehingga dia mengeluarkan bunyi ujaran tersebut untuk konteks dan situasi sosial tertentu.

Dalam konteks ini inferensi yang bisa ditarik dari hubungan antara analisis pragmatik dan semantik yaitu bahwa dalam Pragmatik unsur manusia (penutur) dimasukkan dalam unit analisis sedangkan dalam Semantik tidak. Jika diekspresikan dengan menggunakan istilah fitur semantik, fitur dari kajian Pragmatik dilihat dari aspek analisis adalah {+human} sedangkan kajian Semantik adalah {-human}.

Kajian Pragmatik ini tidak hanya berkaitan dengan tuturan langsung dari pembicara atau penutur kepada penutur atau pendengar yang mengisyaratkan

adanya komunikasi lisan tetapi juga melibatkan tuturan dalam ranah tulis. "Pragmatics is concerned with the study of meaning as communicated by a speaker (or writer) and interpreted by listener (or reader) (Ibid: 3). Proses berbahasa dalam praktik komunikasi untuk menyampaikan pesan dari penutur (*speaker*) kepada petutur (*listener*) tidak hanya bersifat langsung dalam bentuk lisan namun bisa juga dalam bentuk tulis yaitu proses komunikasi antara penulis (*writer*) dan pembaca (*reader*). Pragmatics is the study of how more gets communicated than is said (Ibid.), Pragmatik mengkaji bagaimana sebuah pesan bisa lebih terkomunikasikan daripada sekedar dikatakan.

1.8.2 Teori Tindak Tutur

Istilah tindak tutur (*speech act*) umumnya disandingkan dengan peristiwa tutur (*speech event*) dan situasi tutur (*speech situation*) karena tindak tutur umumnya terjadi pada suatu peristiwa dan situasi tutur tertentu. Tindak tutur menurut Yule (1996: 47) didefinisikan dengan, *actions performed via utterances*, 'tindakan yang dilakukan melalui ujaran'.

Tokoh pencetus teori tindak tutur adalah Austin yang dituliskannya dalam sebuah buku yang sangat terkenal, "*How To Do Things with Words*". Konsep dasar dari teori tindak tuturnya adalah tindakan yang dilakukan melalui tuturan. Bahwa pada dasarnya, melakukan tindak ujaran adalah melakukan sebuah tindakan.

Pernyataan adalah hal dasar dalam teori tindak tutur Austin yang menurut istilahnya disebut dengan 'konstatif'. Dalam konteks ini pernyataan konstatif

dikontraskan dengan 'performatif'. Makna konstatif adalah pernyataan yang dapat diberikan label 'benar-salah', sedangkan performatif tidak dapat diberikan respons 'benar-salah' karena ujaran performatif ini digunakan untuk melaksanakan tindakan sehingga tidak relevan untuk mempertanyakan kondisi kebenarannya. Misalnya dalam hal seseorang mengucapkan janji untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini tidak bisa kita merespons janji tersebut dengan mengatakan, "Itu tidak benar". Perbedaan dasar antara pernyataan konstatif dengan performatif adalah bahwa konstatif merupakan pernyataan deskripsi yang bisa diketahui kondisi kebenarannya sementara performatif adalah untuk melakukan tindakan sehingga tidak bisa dinilai kondisi kebenarannya.

a. Saya berjanji akan membayar hutang saya besok lusa.

b. Saya nyatakan bahwa saya tidak bersalah.

Kalimat (a) adalah contoh kalimat performatif dengan verba performatif 'berjanji'. Kalimat (a) ini tidak logis jika direspons dengan kalimat, 'itu tidak benar' karena verba 'berjanji' diujarkan untuk melakukan tindakan berikutnya yaitu membayar hutang.

Demikian pula dengan contoh kalimat (b). Kalimat ini juga menunjukkan bahwa verba 'nyatakan' adalah verba performatif karena untuk melakukan tindakan membuat pernyataan bahwa saya tidak bersalah. Kalimat ini tidak dapat direspons dengan menyatakan bahwa kalimat ini benar atau salah. Kalimat tersebut tidak dapat diuji kebenarannya.

Secara pragmatis ada tiga jenis tindakan yang diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*) (Austin dalam Searle, 1974: 23-24; Mey 1993: 236).

Tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu (*the act of saying something*). Konsep ini berkaitan dengan proposisi kalimat, yaitu didalamnya terdapat subjek/topic dan predikat (Wijana, 1996: 17). Dalam hal ini tindak lokusi merupakan tuturan sebuah kalimat yang memiliki maksud dan referen yang sudah jelas.

Tindak ilokusi merupakan tuturan selain berfungsi untuk mengatakan sesuatu atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu (*the act of doing something*). Untuk menafsirkan tindak ilokusi ini diperlukan pemahaman terhadap situasi tutur, karena pemaknaan tindak tutur ini dipengaruhi oleh aspek situasi tutur.

Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang mengharapkan respons dari mitra tutur terhadap tuturan yang dituturkan oleh penutur, baik berupa tindakan maupun jawaban (*the act of effecting someone*).

Yule (1996: 53) dalam bukunya *Pragmatics* memberikan lima jenis klasifikasi fungsi tindak tutur yaitu: deklarasi (*declaration*), representasi (*representatives*), ekspresif (*expressives*), direktif (*directives*), dan komisif (*commissives*). Klasifikasi yang diberikan oleh Yule senada dengan apa yang disebutkan oleh Rustono (1999: 39) yang membagi fungsi performatif tindak tutur menjadi lima kategori.

1.8.2.1 Tindak Tutur Deklarasi

...declarations are those kinds of speech acts that change the world via utterance. 'deklarasi adalah jenis-jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui ujaran'. (Yule: 1996). Sementara Rustono (1999) menyebutkan bahwa tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang dimaksudkan oleh penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dsb.) yang baru.

Yang termasuk dalam jenis tindak tutur deklarasi ini misalnya tuturan-tuturan dengan maksud *mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabdikan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, memaafkan* semua termasuk dalam kategori tindak tutur deklarasi.

Dalam tindak tutur deklarasi ini, penutur mengubah keadaan dunia dengan menggunakan ujaran. Syarat agar tindak tuturannya memiliki efek terhadap keadaan atau dunia yaitu mengubah maka penuturnya harus memiliki peran/status institusional khusus dan di dalam konteks tertentu agar ujaran deklarasinya bisa dilaksanakan dengan tepat.

1.8.2.2 Tindak Tutur Representasi

...are those kinds of speech acts that state what the speaker believes to be the case or not, 'jenis-jenis tindak tutur yang menyatakan bahwa penutur atau pembicara percaya akan apa yang diutarakannya dengan kata lain tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang telah diujarkan

(Rustono, 1999: 40). Yang termasuk dalam tindak tutur ini adalah tuturan *menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, memberikan, kesaksian, dsb.* pada tuturan "dia yang mencuri sandal di masjid kemarin", si penutur terikat dengan kebenaran isi tuturan yang dia ujarkan.

Untuk menguji kebenaran tuturan tersebut maka perlu pengetahuan di lapangan bahwa benar-benar dia yang mencuri sandal di masjid itu. Penutur bertanggung jawab terhadap kebenaran isi tuturan. Penutur juga mempercayai isi dari tuturan yang dia ujarkan. Tuturan representatif ini juga dinamakan dengan tuturan asertif yaitu pernyataan yang diyakini kebenarannya oleh si penutur, misalnya pada tuturan, "Jalan itu rusak parah".

1.8.2.3 Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan oleh penutur atau pembicara. Tuturan yang menyatakan keadaan psikologis penutur, bisa berupa rasa senang, puas, sedih, menyesal, tidak suka, benci, dan sebagainya. Penyebab keadaan itu bisa karena mitra tutur maupun karena si penutur sendiri yang jelas tuturan ekspresif ini menyatakan pengalaman psikologis dari penutur. Contoh tuturan ekspresif ini misalnya,

- saya sungguh menyesal telah menyakiti dia.
- Sedih rasanya mendengar kabar dari kampung.
- Luar biasa tempat ini!

1.8.2.4 Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif adalah jenis tuturan untuk membuat orang lain melakukan seperti apa yang dituturkan. Maksud dari tuturan direktif tidak lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dituturkan. Tuturan ini mengungkapkan keinginan dari si penutur melalui tuturannya kepada orang lain. Jenis tuturan ini termasuk *perintah, permintaan, saran, pesan*, dan sebagainya. Tuturan ini bisa berupa tuturan negatif bisa juga positif. Contoh:

- Jangan injak rumput itu!
- Tolong ambilkan tasku!
- Bolehkah aku pinjam uangmu?

1.8.2.5 Tindak Tutur Komisif

...are those kinds of speech acts that speakers use to commit themselves to some future action. 'jenis-jenis tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkan', misalnya *berjanji, bersumpah, mengancam, menyanggupi*, dan sebagainya.

Pada tuturan "saya sanggup mengerjakannya sendiri", penutur mengikat diri atau berkomitmen untuk dapat melaksanakan apa yang dituturkan pada masa yang akan datang. Karakteristik tuturan komisif ini adalah tindakan yang belum dilakukan atau akan dilakukan di masa yang akan datang.

Mey dalam bukunya yang berjudul *Pragmatics: an Introduction* membagi pragmatik menjadi dua yaitu mikropragmatik dan makropragmatik.

Mikropragmatik mencakupi referensi dan implikatur, tindak tutur, verba tindak tutur dan tindak tutur tak langsung, dan klasifikasi tindak tutur. Sedangkan makropragmatik meliputi analisis percakapan, metapragmatik, dan pragmatik sosial.

1.8.3 Konteks dan Situasi Tutur

Kedua istilah tersebut memiliki kedekatan konsep. Dalam analisis pragmatik konteks dan situasi tutur memiliki peran yang sangat penting karena komunikasi akan selalu melibatkan situasi tertentu terkait dengan topik tertentu dan diikuti oleh penutur dan petutur (mitra tutur).

Konteks adalah sarana yang fungsinya untuk memperjelas sesuatu. Dalam setiap situasi tutur komunikasi penyampaian pesan dari penutur kepada mitra tutur selalu memiliki konteks. Sarana tersebut bisa merupakan bagian dari ekspresi pesan yang berfungsi mendukung kejelasan maksud dan situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa (Rustono, 1999: 20).

Sarana atau konteks yang merupakan bagian dari ekspresi yang dapat mendukung maksud dan tujuan dari ekspresi disebut pula dengan koteks (*co-text*). Koteks ini bisa mendahului suatu ekspresi bisa juga setelah ekspresi dalam sebuah kalimat atau tuturan. Misalnya dalam ekspresi papan peringatan yang banyak terdapat di kampung-kampung,

- Pelan-Pelan, banyak anak kecil (a)

maksud dari ekspresi tadi sudah jelas yaitu ditujukan bagi para pengguna jalan yang melintasi tempat tersebut untuk berkendara atau berjalan pelan-pelan. Sedangkan frasa berikutnya, "banyak anak kecil" merupakan koteks dari ekspresi peringatan tersebut yang hadir menyertai ekspresi utama "Pelan-Pelan". Dengan demikian koteks "banyak anak kecil" memperjelas maksud dari ekspresi papan peringatan tersebut.

Demikian juga dengan ekspresi papan peringatan berikut,

- Awas! Jalan Pelan-Pelan (b)

Pada ekspresi tersebut sama dengan ekspresi (a). Ekspresi (b) juga jelas tujuannya yaitu untuk memperingatkan para pengendara motor atau mobil agar berjalan pelan-pelan. Kata 'awas' yang mendahului ekspresi tersebut merupakan koteks dari ekspresi peringatan yang hadir mendahului ekspresi utama. Jelas di sini koteks tersebut semakin memperjelas maksud dari papan peringatan tersebut agar para pelintas yang membaca papan peringatan tersebut tahu resiko atau konsekuensinya jika tidak melakukan apa yang ditulis di papan peringatan itu.

Sementara situasi yang mendukung atau berkaitan dengan suatu peristiwa lazim disebut dengan konteks saja (*context*). Menurut Alwi dalam Rustono (1999: 21) konteks terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

- situasi
- pembicara
- pendengar
- waktu

- tempat adegan
- topik
- peristiwa
- bentuk amanat
- kode, dan
- sarana

Peristiwa tutur (*speech event*) merupakan peristiwa sosial yang mensyaratkan harus hadirnya minimal pembicara/penulis dan pendengar/pembaca yang berinteraksi dan untuk penyampaian pesan/amanat mengenai topik-topik tertentu dan di tempat-tempat dan waktu tertentu pula.

Menurut Hymes dalam Rustono (1999: 21) faktor-faktor yang menandai adanya sebuah peristiwa tutur ada delapan:

- a. *setting* atau *scene*. Tempat peristiwa tutur berlangsung
- b. *participant*. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tutur tersebut, bisa penutur, pendengar, atau pihak ketiga lainnya.
- c. *end*. Tujuan dari adanya peristiwa tutur.
- d. *act*. Tindakan yang dilakukan oleh penutur dalam sebuah peristiwa tutur.
- e. *key*. Nada suara atau ragam bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan tuturan yang dimaksud.
- f. *instrument*. Ekspresi itu bisa lisan bisa juga tulis. Bisa dengan bersemuka atau pun dengan telpon.
- g. *norm*. Norma atau aturan yang sudah disepakati bersama baik oleh penutur maupun oleh pendengar.

tinggal di daerah pegunungan mengatakan, "jaraknya dekat dari sini" (konteks sedang memberikan petunjuk kepada orang asing) akan berbeda jika orang yang tinggal di kota yang mengatakan ekspresi tersebut. Seperti diketahui bahwa kontur, keadaan geografis daerah pegunungan sangat sulit diukur dengan jarak yang pasti. Ini berbeda dengan di daerah perkotaan yang dengan mudah mengukur jarak suatu tempat dengan pasti. Oleh karena itu jika tahu penuturnya adalah warga di tempat pegunungan tersebut dapat dipastikan menimbulkan perbedaan penafsiran bagi yang menanyainya.

Topik tutur juga hal yang penting dalam sebuah peristiwa tutur. Saat seseorang ikut terlibat dalam sebuah pembicaraan (peristiwa tutur) apalagi jika dia tidak mengikuti pembicaraan tersebut dari awal tentu akan kesulitan mengikuti dan memahami setiap ekspresi yang keluar dalam peristiwa tutur tersebut. Biasanya kita akan bertanya langsung kepada peserta tutur lainnya topik apa yang sedang dibicarakan.

Dengan mengetahui topik dari sebuah peristiwa tutur, kita akan dengan mudah mengikuti sebuah diskusi atau pembicaraan karena di dalam otak kita sudah disiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan topik yang sudah kita ketahui. Perhatikan ekspresi berikut.

- Strukturnya sangat bagus (c)

Jika kita tidak tahu topik saat ujaran di atas muncul dalam sebuah peristiwa tutur, sulit untuk mengetahui maksud dari ekspresi tersebut. Kita tidak tahu struktur apa yang dimaksud. Bagi penjual hewan ternak untuk qurban, struktur bisa berarti

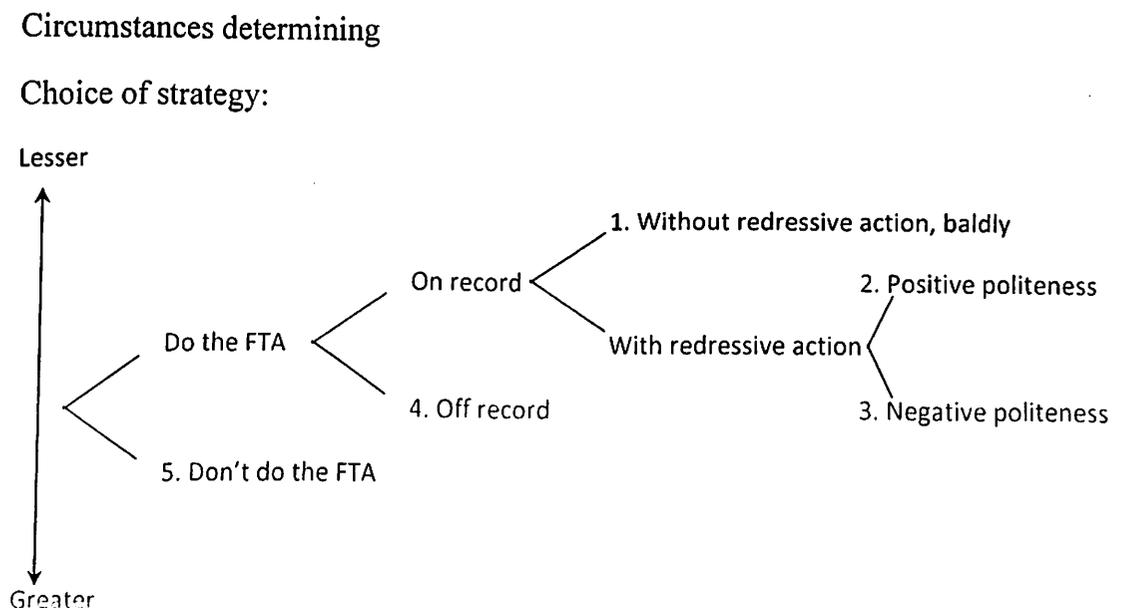
Menurut Brown dan Levinson (1987: 65-68) dalam konsep tentang 'muka' terdapat berbagai tuturan yang cenderung merupakan tindakan yang tidak menyenangkan atau disebut dengan tindakan pengancaman muka. Brown dan Levinson (1987: 60) menyebut tindakan pengancaman muka dengan FTA (*Face Threatening Act*).

Terdapat dua jenis FTA menurut Brown dan Levinson (1987: 65), yaitu pengancaman muka positif dan muka negatif. Tindakan pengancaman muka negatif meliputi: perintah dan permintaan, saran, nasihat, peringatan, ancaman, tantangan, tawaran, janji, pujian, dan ungkapan perasaan negatif seperti kebencian dan kemarahan (Brown dan Levinson, 1987: 65-66). Tindakan pengancaman muka positif meliputi: ketidaksetujuan, kritik, tindakan merendahkan atau mempermalukan, keluhan, kemarahan, dakwaan, penghinaan, pertentangan, tantangan, dan sebagainya sesuai penjelasan Brown dan Levinson (1987: 66-67). Brown dan Levinson (1987: 74-77) juga menjelaskan bahwa dalam penggunaan FTA dipengaruhi oleh tiga faktor sosial, yaitu kekuasaan (*power*), jarak sosial (*distance*) dan tingkat pembebanan (*ranking of imposition*). Penjelasan dari ketiga faktor sosial tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan (*Power*) merupakan pernyataan hubungan yang menyatakan seberapa besar seseorang dapat memaksa orang lain tanpa kehilangan muka (Brown dan Levinson, 1987: 76)

2. Jarak Sosial (*Social Distance*) merupakan ukuran kontak sosial antara penutur dan lawan tutur mengenal satu sama lain, dan bagaimana hubungan mereka dalam konteks (Brown dan Levinson, 1987: 76-77)
3. Tingkat Pembebanan (*Ranking of Imposition*) merupakan status relatif jenis tindak tutur di dalam situasi yang dianggap tidak terlalu mengancam muka (Brown dan Levinson, 1987: 77).

Menurut Brown dan Levinson (1987: 60) FTA dibagi menjadi lima strategi seperti terlihat pada gambar berikut:



(Brown dan Levinson, 1987: 60)

1.8.5 Strategi Kesantunan

Brown dan Levinson (1987: 60) membagi strategi-strategi kesantunan menjadi lima strategi, yaitu strategi langsung tanpa basa-basi (*bald on record strategy*), strategi kesantunan positif (*positive politeness strategy*), strategi kesantunan negatif (*negative politeness strategy*), strategi tidak langsung (*off record*), dan strategi tidak mengancam muka (*don't do the FTA*).

1. Strategi Langsung tanpa Basa-basi (*Bald on Record Strategy*)

Menurut Brown dan Levinson (1987: 69-70) strategi langsung tanpa basa-basi merupakan strategi melakukan FTA untuk menyatakan sesuatu dengan jelas. Alasan utama dipilihnya strategi langsung tanpa basa-basi menurut Brown dan Levinson (1987:95) adalah karena penutur ingin melakukan FTA dengan efisiensi maksimum.

Terdapat dua jenis sub-strategi dalam strategi langsung tanpa basa-basi, yaitu sub-strategi dengan cara tanpa meminimalisasikan FTA dan orientasi FTA untuk menyelamatkan muka lawan tutur, sesuai penjelasan Brown dan Levinson (1987: 95-99). Contoh strategi langsung tanpa basa-basi adalah sebagai berikut.

(4) *Join the club kid!*

Tuturan di atas menunjukkan bahwa penutur menggunakan strategi langsung tanpa basa-basi, karena penutur tidak mempedulikan muka lawan tuturnya. Dalam pemilihan strategi ini FTA tidak diminimalisasikan untuk menyelamatkan muka. Strategi ini juga dapat digunakan apabila penutur memiliki kekuasaan (*power*) lebih tinggi dibanding lawan tutur dan penutur tidak mempedulikan apabila tidak terjadi kerjasama dari lawan tuturnya.

2. Strategi Kesantunan Positif (*Positive Politeness Strategy*)

Menurut Brown dan Levinson (1987: 101) strategi kesantunan positif merupakan strategi melakukan FTA dengan cara penyelamatan muka atau menjaga muka positif lawan tutur. Dalam melakukan FTA tersebut, penutur memberikan kesan bahwa penutur mempunyai keinginan yang sama terhadap lawan tutur untuk menunjukkan persahabatan di antara mereka (Brown dan Levinson, 1987: 101). Berdasarkan penjelasan Brown dan Levinson (1987: 103-129) kesantunan positif mempunyai beberapa sub-strategi yang meliputi:

- a. Sub-strategi 1: memberi perhatian pada lawan tutur dengan memperhatikan minat, keinginan, kelakuan, kebutuhan dan barang-barang lawan tutur (Brown dan Levinson, 1987: 103).
- b. Sub-strategi 2: melebihkan minat, persetujuan, simpati terhadap lawan tutur dengan memberikan intonasi maupun penekanan melalui tuturannya (Brown dan Levinson, 1987: 104).

- c. Sub-strategi 3: meningkatkan ketertarikan terhadap lawan tutur dengan menyelipkan ungkapan yang menarik perhatian lawan tutur (Brown dan Levinson (1987: 106).
- d. Sub-strategi 4: menggunakan penanda yang menunjukkan jati diri atau kelompok dengan menggunakan bentuk sapaan, bahasa atau dialek kelompok, jargon, slang dan ellipsis (Brown dan Levinson, 1987: 107).
- e. Sub-strategi 5: mencari dan mengusahakan persetujuan terhadap lawan tutur dengan mengulang sebagian tuturan lawan tutur untuk menunjukkan kesetujuannya (Brown dan Levinson, 1987: 112).
- f. Sub-strategi 6: menghindari ketidaksetujuan terhadap lawan tutur dengan cara menunjukkan persetujuan (Brown dan Levinson, 1987: 113).
- g. Sub-strategi 7: mempresuposisikan sejumlah persamaan penutur dan lawan tutur dengan mengurangi FTA melalui sebuah percakapan yang dapat menarik minat lawan tutur terhadap tuturan penutur (Brown dan Levinson, 1987: 117).
- h. Sub-strategi 8: menyatakan lelucon (Brown dan Levinson, 1987: 124).
- i. Sub-strategi 9: mempresuposisikan bahwa penutur memahami keinginan lawan tuturnya dengan menyatakan bahwa penutur dan lawan tutur adalah kooperator (Brown dan Levinson, 1987: 125).
- j. Sub-strategi 10: membuat penawaran atau janji dengan tujuan memuaskan muka positif lawan tutur (Brown dan Levinson, 1987: 125).

- k. Sub-strategi 11: menunjukkan rasa optimisme beranggapan bahwa lawan tutur menginginkan atau membantu penutur mencapai keinginan penutur (Brown dan Levinson, 1987: 126).
- l. Sub-strategi 12: berusaha melibatkan lawan tutur dan penutur dalam suatu kegiatan tertentu dengan penggunaan kata *we* atau *let's* misalnya (Brown dan Levinson, 1987: 127).
- m. Sub-strategi 13: memberikan dan meminta alasan dengan melibatkan lawan tutur dalam suatu kegiatan yang dikehendaki penutur (Brown dan Levinson, 1987:128).
- n. Sub-strategi 14: mengharap atau menuntut timbal balik (Brown dan Levinson,1987: 129).
- o. Sub-sirategi 15: memberikan penghargaan tidak hanya benda nyata tetapi juga keinginan berinteraksi, keinginan untuk disukai, diakui, diperhatikan, dipahami, didengarkan, dan sebagainya (Brown dan Levinson, 1987: 129).

3. Strategi Kesantunan Negatif (*Negative Politeness Strategy*)

Menurut Brown dan Levinson (1987: 129) strategi kesantunan negatif merupakan strategi menyelamatkan muka negatif lawan tutur untuk mempertahankan kebebasan bertindak lawan tutur. Dalam melakukan strategi ini, penutur mengakui dan menghormati muka negatif lawan tuturnya. Brown dan

Levinson (1987: 129-211) membagi kesantunan negatif menjadi beberapa sub-strategi yang meliputi:

- a. Sub-strategi 1: ungkapan secara tidak langsung untuk menghindari gangguan terhadap muka (Brown dan Levinson, 1987: 132).
- b. Sub-strategi 2: menggunakan pagar (Brown dan Levinson, 1987: 145).
- c. Sub-strategi 3: bersikap pesimis dengan cara bersikap hati-hati dan jangan terlalu optimis (Brown dan Levinson, 1987: 173)
- d. Sub-strategi 4: meminimalkan pembebanan terhadap lawan tutur dengan mengurangi kekuatan atau daya ancaman terhadap muka lawan tutur (Brown dan Levinson, 1987: 176).
- e. Sub-strategi 5: menyatakan rasa hormat (Brown dan Levinson, 1987: 178).
- f. Sub-strategi 6: menggunakan permohonan maaf (Brown dan Levinson, 1987:187).
- g. Sub-strategi 7: jangan menyebutkan penutur dan lawan tutur (Brown dan Levinson, 1987: 190).
- h. Sub-strategi 8: menyatakan FTA sebagai suatu kaidah sosial yang umum berlaku (Brown dan Levinson, 1987: 206).
- i. Sub-strategi 9: nominalisasikan pernyataan (Brown dan Levinson, 1987: 207).

- j. Sub-strategi 10: menyatakan secara jelas bahwa penutur telah memberikan kebaikan (hutang) atau tidak kepada lawan tutur (Brown dan Levinson, 1987:210).

4. Strategi Tidak Langsung (*Off Record Strategy*)

Menurut Brown dan Levinson (1987: 211) strategi tidak langsung merupakan strategi melakukan FTA secara tidak langsung dengan membiarkan lawan tutur memutuskan bagaimana menafsirkan tuturan penutur. Beberapa sub-strategi tidak langsung sesuai penjelasan Brown dan Levinson (1987: 213-227) meliputi:

- a. Sub-strategi 1: memberi petunjuk dengan mengemukakan alasan melakukan tindakan (Brown dan Levinson, 1987: 213).
- b. Sub-strategi 2: mengasosiasikan petunjuk dengan menyebutkan sesuatu yang diasosiasikan pada tindakan yang diminta kepada lawan tutur (Brown dan Levinson, 1987: 215).
- c. Sub-strategi 3: mempresuposisikan maksud penutur (Brown dan Levinson, 1987: 217).
- d. Sub-strategi 4: menyatakan kurang dari sebenarnya dengan membatasi sejumlah atribut untuk mengimplikasikan sesuatu yang buruk (Brown dan Levinson, 1987: 217).

- e. Sub-strategi 5: menyatakan suatu hal secara berlebihan dengan membesar-besarkan keadaan dari yang sebenarnya (Brown dan Levinson, 1987: 219).
- f. Sub-strategi 6: mengulang tuturan tanpa menambah kejelasan dengan mengujarkan kebenaran yang paten dan penting (Brown dan Levinson, 1987: 220).
- g. Sub-strategi 7: menggunakan pertentangan dengan mengemukakan kebenaran dan mendorong lawan tutur mendamaikan masalah (Brown dan Levinson, 1987: 221).
- h. Sub-strategi 8: menyindir dengan cara menyatakan maksud secara tidak langsung dan berlawanan (Brown dan Levinson, 1987: 221).
- i. Sub-strategi 9: menggunakan kiasan / metafora dengan menyembunyikan konotasi nyata dari tuturan yang dituturkan (Brown dan Levinson, 1987: 222).
- j. Sub-strategi 10: menggunakan pertanyaan retorik dengan mengemukakan pertanyaan dari jawaban yang mengambang untuk menyatakan FTA (Brown dan Levinson, 1987: 223).
- k. Sub-strategi 11: bermakna ganda (Brown dan Levinson, 1987: 225).
- l. Sub-strategi 12: menyamakan objek FTA atau pelanggaran yang dilakukan (Brown dan Levinson, 1987: 226).

- m. Sub-strategi 13: menggeneralisasikan secara berlebihan untuk menghindari FTA dengan mengemukakan peraturan umum (Brown dan Levinson, 1987: 226).
- n. Sub-strategi 14: menggantikan lawan tutur dengan mengalamatkan FTA pada seseorang yang tidak mungkin terancam mukanya (Brown dan Levinson, 1987: 226).
- o. Sub-strategi 15: mengungkapkan secara tidak lengkap dengan menggunakan ellipsis (Brown dan Levinson, 1987: 227).

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Berpijak pada permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Hakekat penelitian kualitatif berupaya untuk memahami atau menelusuri alasan-alasan maknawi suatu fenomena yang sedang diteliti, dalam penelitian ini berupa fenomena pemakaian jenis dan bentuk tindak tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja PT Tri Patra di Kabupaten Bojonegoro. Penerapan metode deskriptif dilakukan dengan memerikan gejala-gejala kebahasaan secara cermat berdasarkan fakta-fakta kebahasaan yang sebenarnya. Fakta-fakta tersebut didapatkan pada kata, frase, klausa, kalimat atau alinea, yang terdapat dalam dokumen surat perjanjian kerja.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja dan fungsi tindak tutur tersebut dalam surat perjanjian kerja. berdasarkan tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis memerikan dan menjelaskan dengan menggunakan kata-kata dan kalau perlu menggunakan diagram untuk menemukan kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian yang dimaksud. Penelitian ini bersifat induktif yaitu penelitian yang berangkat dari data yang telah dikumpulkan penulis. Kesimpulan selanjutnya diambil berdasarkan analisis data yang diperoleh di lapangan.

Denzin dan Lincoln 1987 (dalam Moleong 2006) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada antara lain dengan metode wawancara, dengan pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dengan kata lain penelitian ini didasarkan pada dua aspek dasar yaitu penelitian yang bersifat naturalistik dan tujuannya adalah untuk memahami sebuah fenomena kebahasaan tertentu dan dalam konteks tertentu (Moleong, 2006: 5—6).

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini secara umum terdiri atas tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Metode yang digunakan dalam tahap pengumpulan data adalah metode simak dengan teknik dasar sadap. Mahsun (2007: 92) mengatakan bahwa pada dasarnya metode simak dalam sebuah penelitian adalah melakukan penyadapan terhadap penggunaan bahasa oleh informan. Mahsun juga menambahkan bahwa penyadapan tidak hanya dilakukan terhadap bahasa-bahasa lisan tetapi termasuk juga bahasa tulis. Oleh karena itu metode simak dengan teknik sadap ini diikuti oleh teknik catat dan rekam. Seluruh data yang diperoleh dicatat dan direkam baik dengan menggunakan buku catatan maupun dengan alat rekam (*recorder*).

Pada tahap analisis data, penulis menggunakan metode distribusional atau metode agih. Metode distribusional adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari bahasa yang diteliti (Sudaryanto dalam Kesuma, 2007: 54). Kesuma (2007: 55) menyatakan bahwa metode agih ini terdiri atas teknik dasar yaitu teknik bagi unsur langsung dan sebelas teknik lanjutan.

Tidak semua teknik lanjutan digunakan, hanya yang berhubungan dengan teknik pemilahan unsur kalimat yang memuat verba tindak tutur yang akan digunakan yaitu perpaduan antara teknik ganti, perluas, dan teknik baca markah.

Selanjutnya penulis memilah data, mengkategorikan data, dan dilanjutkan dengan menganalisis dan melakukan interpretasi data. Data dianalisis secara deskriptif sebagai konsekuensi dari metode penelitian kualitatif yakni penelitian dengan data-data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Sumber data diperoleh dari dokumen surat perjanjian kerja tahun 2012 sementara satuan lingual verba tindak tutur yang terdapat di dalam teks dokumen merupakan satuan lingual yang dianalisis.

2.2 Metode Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata yang bersumber dari sumber data tertulis yakni dari dokumen surat perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah berupa dokumen surat perjanjian kerja tahun 2012 di perusahaan minyak Tri Patra, Kabupaten Bojonegoro. Peneliti dalam penelitian ini juga sekaligus bertindak sebagai instrumen pengumpul data penelitian itu sendiri karena peneliti mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data baik melalui teknik rekam, catat, maupun dengan melakukan wawancara dengan informan. Sugiyono (2009: 305) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Richards dan Schmidt dalam *Dictionary of Language Teaching And Applied Linguistics* (ed. 3, 2002) mendefinisikan metode ini sebagai berikut:

”Triangulation (in qualitative research), the process of collecting data from several different sources or in different ways in order to provide a fuller understanding of a phenomenon. Obtaining data from more than one source (e.g. interviews, observations, and documents) is the most commonly used type of triangulation. Triangulation may also involve using multiple methods (e.g. from interviews, questionnaires, observation schedules, test scores, etc.), multiple researchers (i.e. the use of more than one researcher in a study), or multiple theories for the interpretation of data.

Pada dasarnya teknik penyediaan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling*. Seperti telah disebutkan sebelumnya teknik *sampling* yang digunakan adalah *sampling* bertujuan (*purposive sampling*). Maksud dari penggunaan teknik *sampling* bertujuan ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber data dan bangunannya (*construction*) (Moleong, 2006: 224). Berikut ciri-ciri sampel bertujuan seperti yang diutarakan Moleong:

1. Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.
2. Pemilihan sampel secara berurutan: Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sample dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat diperbandingkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui.

Dari mana ia ditarik atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah berjalan maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan peneliti. Dalam kasus seperti ini teknik sampling bola salju (*snow ball*) dapat bermanfaat.

3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun demikian semakin banyak informasi yang diperoleh dari data semakin fokus pula pada objek yang sedang diteliti.

Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan.

Penelitian ini menggunakan dokumen surat perjanjian kerja tahun 2012. Karena teks dalam surat perjanjian kerja sama untuk seluruh karyawan perusahaan dan susunan redaksinya tetap maka penulis memutuskan untuk menggunakan hanya satu dokumen yakni dokumen tahun 2012. Penentuan penggunaan sampel data dokumen perjanjian kontrak kerja PT Tri Patra Tahun 2012 sesuai dengan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Konteks di lapangan pihak luar manajemen perusahaan tidak bisa bebas mengakses dokumen perjanjian kontrak kerja.

Menurut Sapsford & Jupp (2006: 139) keuntungan menggunakan sumber data dari dokumen tertulis adalah dokumen ini tersedia banyak sekali di instansi-instansi atau pada kepemilikan-kepemilikan pribadi. Menurut Hakim (1987: 36)

dalam Sapsford & Jupp (2006: 139), rekaman-rekaman yang disebutnya dengan 'rekaman administratif': *Vast quantities of information are collated and recorded by organizations and individuals for their own purposes, well beyond the data collected by social scientists purely for research purposes.*

2.2.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen surat perjanjian kerja tahun 2012 PT Tri Patra, Kabupaten Bojonegoro. dokumen surat perjanjian kerja merupakan sumber data primer. Data penelitian difokuskan diambil dari dokumen surat kontrak kerja tersebut. Data penelitian berupa satuan lingual berupa verba tindak tutur yang terdapat dalam kalimat-kalimat perjanjian kerja.

Sebagai sumber data sekunder, penulis menggunakan informan untuk menggali informasi dan memperdalam konteks. Informan yang dipakai adalah karyawan PT Tri Patra Kabupaten Bojonegoro. Informan di ambil dari perusahaan tersebut karena yang bersangkutan dapat memberikan informasi lebih banyak dan lebih akurat untuk mendukung analisis data dalam surat perjanjian kerja. Jumlah informan tidak ditentukan tetapi pada dasarnya semakin banyak informan yang dipakai akan semakin baik karena data sekunder yang mendukung data primer akan semakin banyak. Dengan data yang semakin banyak maka akan semakin mantap pula penelitian yang dilakukan karena pada dasarnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang kaya akan data dan bervariasi (*enriched-data*).

Sumber data dari penelitian ini adalah dokumen tertulis surat perjanjian kontrak kerja tahun 2012. Dokumen kontrak kerja hanya diambil yang tahun 2012

karena dokumen perjanjian kerja ini sebenarnya bersifat intern dan tidak untuk konsumsi publik. Isi dan format perjanjian kontrak kerja juga sama dalam satu tahun sehingga dengan memperoleh sumber data berupa dokumen kontrak tahun 2012 saja sudah dianggap cukup.

Terkait dengan sumber data yang berasal dari dokumen tertulis, Sapsford & Jupp (2006) mengatakan:

...the use of documentary and related sources is highly relevant in three main ways. First, they form a major source of data in social research. First, they form a major source of data in social research. Secondly, the use of existing sources comes in at various stages of the research process (in so far, that is, as these stages are separable). The third point is that these sources are not neutral asocial data whose import is necessarily self-evident...

Ada tiga alasan mengapa penggunaan dokumen dan sumber-sumber sejenis sangat relevan. Pertama, data berupa dokumen tertulis berfungsi sebagai sumber data utama dalam sebuah penelitian sosial. Kedua, sumber data dokumen yang ada bisa digunakan pada tahapan apa saja dalam proses penelitian. Ketiga kebanyakan data-data dokumen untuk kepentingan pribadi.

2.3 Metode Analisis Data

Seperti telah diuraikan dalam subjudul metode penelitian, analisis data dilakukan dengan metode agih atau distribusional yakni metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari bahasa yang diteliti. Penulis

melakukan analisis terhadap satuan kebahasaan dalam hal ini bentuk-bentuk tindak tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja dengan menggunakan teknik dasar bagi unsur langsung maupun dengan teknik lanjutan.

Analisis data dilakukan berdasarkan pada kumpulan data yang sudah didapat untuk selanjutnya dilakukan pemilahan, pengkategorisasian dan kemudian analisis dan interpretasi data. Analisis data tujuannya untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak tutur yang ada dalam dokumen surat perjanjian kerja dan fungsi dari peristiwa tutur dalam dokumen surat perjanjian kerja.

2.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode informal. Metode penyajian data secara informal adalah perumusan hasil analisis dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto dalam Kesuma, 2007) yakni pemaparan hasil-hasi analisis data dengan kata-kata yang mudah dan langsung bisa dipahami.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang sifatnya hanya mengidentifikasi dan mengenali bentuk-bentuk tindak tutur dalam dokumen surat perjanjian kontrak kerja sehingga penyajian hasil analisis secara formal tidak diperlukan. Perumusan kaidah dan konsep baru baik dengan menggunakan kata-kata maupun lambang yang menjadi ciri penyajian hasil analisis meskipun dapat juga dijelaskan dalam metode penyajian informal.

Hasil penelitian akan disajikan dengan menggunakan metode informal dan formal (Sudaryanto, 1993). Metode penyajian informal adalah perumusan

dengan kata-kata biasa walaupun dengan teknik sifatnya, sedangkan penyajian formal adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang.

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga berusaha memerikan bagaimana bentuk-bentuk ungkapan tindak tutur dalam peristiwa tutur dokumen surat perjanjian kerja, selain itu juga disertai penghitungan statistik sederhana untuk menjelaskan analisis kuantitatif. Perhitungan yang bersifat agak kuantitatif hanya untuk memberikan gambaran frekuensi kemunculan dan pemakaian dari masing-masing bentuk tindak tutur.

2.5 Metode Penyediaan Data

2.5.1 Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata yang bersumber dari sumber data tertulis maupun kata-kata yang dihasilkan oleh informan penelitian. Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yaitu naskah transkrip berita "Pojok Madura" di Stasiun Televisi lokal Surabaya. Peneliti dalam penelitian ini juga sekaligus bertindak sebagai instrumen pengumpul data penelitian itu sendiri karena peneliti mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data baik melalui teknik rekam, catat, maupun dengan melakukan wawancara dengan informan. Sugiyono (2009: 305) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Pengumpulan data juga menggunakan metode triangulasi yaitu proses pengambilan data dari berbagai sumber maupun dengan berbagai cara misalnya

dalam penelitian ini digunakan metode observasi lapangan, wawancara terstruktur, dan kuesioner.

Richards dan Schmidt dalam *Dictionary of Language Teaching And Applied Linguistics* (ed. 3, 2002) mendefinisikan metode ini sebagai berikut:

”Triangulation (in qualitative research), the process of collecting data from several different sources or in different ways in order to provide a fuller understanding of a phenomenon. Obtaining data from more than one source (e.g. interviews, observations, and documents) is the most commonly used type of triangulation. Triangulation may also involve using multiple methods (e.g. from interviews, questionnaires, observation schedules, test scores, etc.), multiple researchers (i.e. the use of more than one researcher in a study), or multiple theories for the interpretation of data.

Sumber data lisan diperoleh dari para informan dan sumber data tertulisnya adalah buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (transkrip berita dalam bahasa Madura di stasiun tv lokal JTV). Dengan menggunakan teknik triangulasi ini diharapkan peneliti dapat mengkonfirmasi setiap temuan data dengan cara mencocokkan, mengecek, dan menganalisis berdasarkan sumber data-sumber data lainnya. Dengan demikian akan dicapai pemahaman yang lebih komprehensif terhadap temuan-temuan kebahasaan yang ada. Dengan demikian teknik utama dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan triangulasi (gabungan ketiganya).

2.5.2 Teknik Penyediaan Data

Pada dasarnya teknik penyediaan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling*. Seperti telah disebutkan sebelumnya teknik *sampling* yang digunakan adalah *sampling* bertujuan (*purposive sampling*).

Maksud dari penggunaan teknik *sampling* bertujuan ini adalah untuk menjangring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber data dan bangunannya (*construction*) (Moleong, 2006: 224). Berikut ciri-ciri sampel bertujuan seperti yang diutarakan Moleong:

- 3 Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.
- 4 Pemilihan sample secara berurutan: Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sample dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat diperbandingkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Dari mana ia ditarik atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah berjalan maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan peneliti. Dalam kasus seperti ini teknik sampling bola salju (*snow ball*) dapat bermanfaat.
- 5 Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun demikian semakin banyak informasi yang diperoleh dari data semakin fokus pula pada objek yang sedang diteliti.
- 6 Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan.

4.5 Data Penelitian

Data penelitian adalah kata atau kalimat-kalimat yang terdapat di dalam surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor. 060/TPEC-MCLLC/IV/2012. kalimat-kalimat tersebut kemudian dipilah dan dikategorisasikan berdasarkan satuan-satuan analisis tertentu yaitu jenis verba atau kata kerja yang dapat dikategorikan sebagai tindak tutur.

Daftar kode dan senarai data tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Data	Kode
1	Pihak Pertama setuju mempekerjakan Pihak Kedua...	D.1
2	Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua di proyek...	D.2
3	Tugas pekerjaan yang wajib dikerjakan Pihak Kedua sesuai dengan uraian pekerjaan...	D.3
4	Bila dipandang perlu Pihak Pertama dapat memberikan tugas dan pekerjaan di tempat lain...	D.4
5	Perjanjian ini dibuat dan berlaku terhitung mulai tanggal...	D.5
6	Jika diperlukan perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku...	D.6
7	...Pihak Pertama akan membayar upah kepada Pihak Kedua...	D.7

8	Pihak kedua selain menerima upah... berhak atas insentif kehadiran...	D.8
9	Pembayaran upah... akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya...	D.9
10	Pembayaran insentif... akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada...	D.10
11	Pembayaran upah dan insentif... akan dilakukan melalui transfer kepada rekening...	D.11
12	...Pihak Kedua harus memberitahukan rencana perubahan...	D.12
13	Perusahaan akan memotong, menyeter, dan melaporkan...	D.13
14	Pihak Pertama akan memberikan Tunjangan Hari Raya...	D.14
15	Pihak Pertama akan memberikan Tunjangan Hari Raya...	D.15
16	Pekerja yang masa kerjanya kurang... tidak berhak atas THR	D.16
17	Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua...	D.17
18	Selain yang disebutkan...premi asuransi ditanggung oleh Pihak Pertama	D.18

19	Pihak Kedua berhak atas cuti selama 12 hari kerja	D.19
20	Pihak Kedua harus mengajukan permohonan...	D.20
21	Pihak Pertama tidak akan membayar cuti tahunan Pihak Kedua...	D.21
22	Pihak Pertama dapat memberikan ijin kepada Pihak Kedua...	D.22
23	Ijin meninggalkan... harus diperoleh terlebih dahulu...	D.23
24	Ijin meninggalkan... dapat diberikan oleh Pihak Pertama setelah...	D.24
25	Hari dan Jam kerja normal... akan tunduk pada ketentuan yang berlaku...	D.25
26	Hari libur di... adalah Sabtu dan hari libur resmi...	D.26
27	Pihak Pertama akan memberitahukan kepada...	D.27
28	Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan tersebut.	D.28
29	Pihak Kedua wajib melakukan kerja lembur	D.29
30	Perhitungan upah lembur... berdasarkan pada peraturan ketenagakerjaan...	D.30
31	Upah lembur bulan berjalan dibayarkan kepada Pihak	D.31

	barang, data, dan informasi milik perusahaan...	
43	Pihak Kedua wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keserasian lingkungan kerja	D.43
44	Pihak Kedua wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan penuh kesadaran...	D.44
45	Pihak Kedua wajib memelihara dan meningkatkan kekompakan...	D.45
46	Pihak Kedua wajib menciptakan suasana kerja yang baik...	D.46
47	Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya...	D.47
48	Pihak Kedua wajib berpakaian rapi dan sopan...	D.48
49	Pihak Kedua wajib bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap...	D.49
50	Pihak Kedua wajib menolak setiap pemberian atau janji...	D.50
51	Pihak Kedua wajib menolak atau tidak melakukan pekerjaan di perusahaan yang sama...	D.51
52	Pihak Kedua wajib menjaga, memelihara, dan meningkatkan nama baik Pihak Pertama...	D.52

53	Pihak Kedua wajib menghindari perbuatan yang tercela...	D.53
54	Pihak Kedua dilarang menerima imbalan baik langsung maupun tidak langsung...	D.54
55	Pihak Kedua dilarang membawa/menggunakan...	D.55
56	Pihak Kedua dilarang menyalahgunakan wewenangnya.	D.56
57	Pihak Kedua dilarang membawa senjata api/tajam ke dalam lingkungan kerja...	D.57
58	Pihak Kedua dilarang melakukan tindakan-tindakan sabotase...	D.58
59	Pihak Kedua dilarang membujuk, menghasut... agar karyawan tidak masuk kerja	D.59
60	Pihak Kedua dilarang meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja...	D.60
61	Pihak Kedua dilarang menulis/mencorat-coret di lingkungan perusahaan...	D.61
62	Pihak Kedua dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya...	D.62
63	Pihak Kedua dilarang menjual/memperdagangkan barang-barang apapun...	D.63

64	Pihak Kedua dilarang tidur di tempat kerja...	D.64
65	Perusahaan dapat memberikan sanksi peringatan...	D.65
66	Jika Pihak Kedua...Pihak Pertama berhak memberikan peringatan terakhir.	D.66
67	...Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja...	D.67
68	...Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja...tanpa perlu peringatan terlebih dahulu.	D.68
69	...hal itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.	D.69
70	...Pihak Kedua dianggap tidak masuk kerja tanpa ijin...	D.70
71	...upah Pihak Kedua dikurangi sebesar...	D.71
72	...maka pihak kedua dianggap mengundurkan diri.	D.72
73	...maka pihak pertama berhak memutuskan hubungan kerja dengan pihak kedua tanpa...	D.73
74	Perjanjian kerja waktu tertentu ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu...	D.74
75	Pihak kedua tidak berhak memperoleh uang pesangon...pada saat perjanjian ini berakhir...	D.75

76	...maka pihak yang mengakhiri harus membayar ganti rugi ...	D.76
77	...Pihak kedua tidak diperkenankan membuka rahasia perusahaan pihak pertama...	D.77
78	...pihak pertama berhak menggunakan segala upaya hukum...	D.78
79	Pihak pertama tidak terikat pada janji-janji lisan...	D.79
80	Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini tunduk pada peraturan...	D.80
81	Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membuat perjanjian kerja untuk waktu tertentu...	D.81

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian ini berupa deskripsi bentuk-bentuk tindak tutur yang terdapat dalam dokumen surat perjanjian kontrak kerja nomor 060/TPEC-MCLLC/IV/2012 tahun 2012 dan deskripsi fungsi, tujuan, dan konteks pragmatik pemakaian bentuk tindak tutur dalam surat perjanjian kontrak kerja tahun 2012. Satuan lingual berupa verba tindak tutur berdasarkan pembagian jenis-jenis tindak tutur Yule (2006) dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata dan tabel untuk lebih memperjelas deskripsi.

Judul dokumen surat perjanjian kerja yang digunakan sebagai data utama adalah "Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu" nomor 060/TPEC-MCLLC/IV/2012. Jangka waktu berlakunya surat perjanjian kerja ini selama satu tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 2013. Format dan isi perjanjian kerja ini sama untuk seluruh karyawan sehingga data utama berupa dokumen surat perjanjian kerja ini dianggap sebagai data tunggal dan berlaku untuk seluruh karyawan. Analisis satuan lingual berupa bentuk-bentuk *speech act* di dalam perjanjian kerja ini dilakukan terhadap satu naskah yaitu dokumen perjanjian kerja.

Kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan dokumen resmi dan bersifat legal formal. Karena sifatnya yang sangat formal akibat adanya tuntutan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang tegas dan tidak multitafsir. Hal ini disebabkan karena untuk menjaga

kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari selama perjanjian berlangsung antara pihak pertama (perusahaan) dan pihak kedua (pekerja).

Orientasi kalimat dan bahasanya adalah kepada semua pihak yang diikat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian status antara pihak pertama maupun pihak kedua, meskipun pada kenyataannya berbeda, di dalam perjanjian tersebut sama. Pilihan verba kalimatnya juga tidak mengekspresikan bahwa pihak yang satu lebih tinggi posisinya dibanding pihak yang lain. Oleh sebab itu, dalam sebuah perjanjian referen yang digunakan umumnya adalah orang ketiga untuk menjaga agar isi perjanjian tidak memihak salah satu pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Pronomina pelibat dalam sebuah perjanjian kerja menggunakan kata 'pihak' yang mengacu kepada orang ketiga dan lebih bersifat netral.

Dalam dokumen perjanjian kerja ini, pihak pertama adalah yang mewakili perusahaan yang merekrut karyawan dan pihak kedua adalah karyawan yang akan bekerja untuk pihak pertama. Naskah perjanjian kerja ini yang menyusun adalah pihak perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh manajer proyek. Kontrak kerja pada akhirnya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak merasa tidak dirugikan dengan ditandatanganinya surat perjanjian kerja tersebut. Yang sering menjadi masalah adalah seringkali pihak kedua yaitu yang akan dipekerjakan tidak memahami isi dari perjanjian kerja tersebut.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa bahasa yang dipakai dalam perjanjian kerja adalah bahasa yang kaku, formal, dan lugas sehingga diharapkan

masing-masing pihak bisa memahami isi perjanjian dengan baik. Bahasa yang digunakan pun bersifat netral artinya tidak memihak salah satu pihak meskipun yang menyiapkan isinya adalah pihak pertama.

Berdasarkan klasifikasi Hymes mengenai faktor-faktor yang menyertai sebuah peristiwa tutur (SPEAKING), dokumen surat perjanjian kerja dapat di analisis sebagai berikut.

- a. *Setting* atau *scene*. Latar terjadinya peristiwa tutur dalam dokumen perjanjian kerja adalah perusahaan atau kantor dalam hal ini kantor Tri Patra di Kabupaten Bojonegoro. Relasi yang terbangun antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja adalah relasi sub-ordinat.
- b. *Participant*. Peserta dari peristiwa tutur dalam surat perjanjian kerja adalah pihak pertama yaitu perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diwakili oleh Manajer HRD nya dan pihak kedua yaitu pekerja yang akan dipekerjakan untuk perusahaan.
- c. *End*. Tujuan dari adanya surat perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam beberapa aspek terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja untuk perusahaan. Semua aspek yang terkait dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja dituangkan semua di dalam surat perjanjian dengan tujuan agar para pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
- d. *Act*. Dalam konteks bahasa dalam surat perjanjian kerja, tindakan yang dilakukan oleh penutur mengacu kepada pihak perusahaan. Tindakan

tersebut berupa penyusunan kalimat-kalimat di dalam tiap-tiap klausul dalam surat perjanjian kerja. Klausul-klausul di dalam surat perjanjian tersebut adalah representasi dari kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan hak-hak normatif dari pekerja.

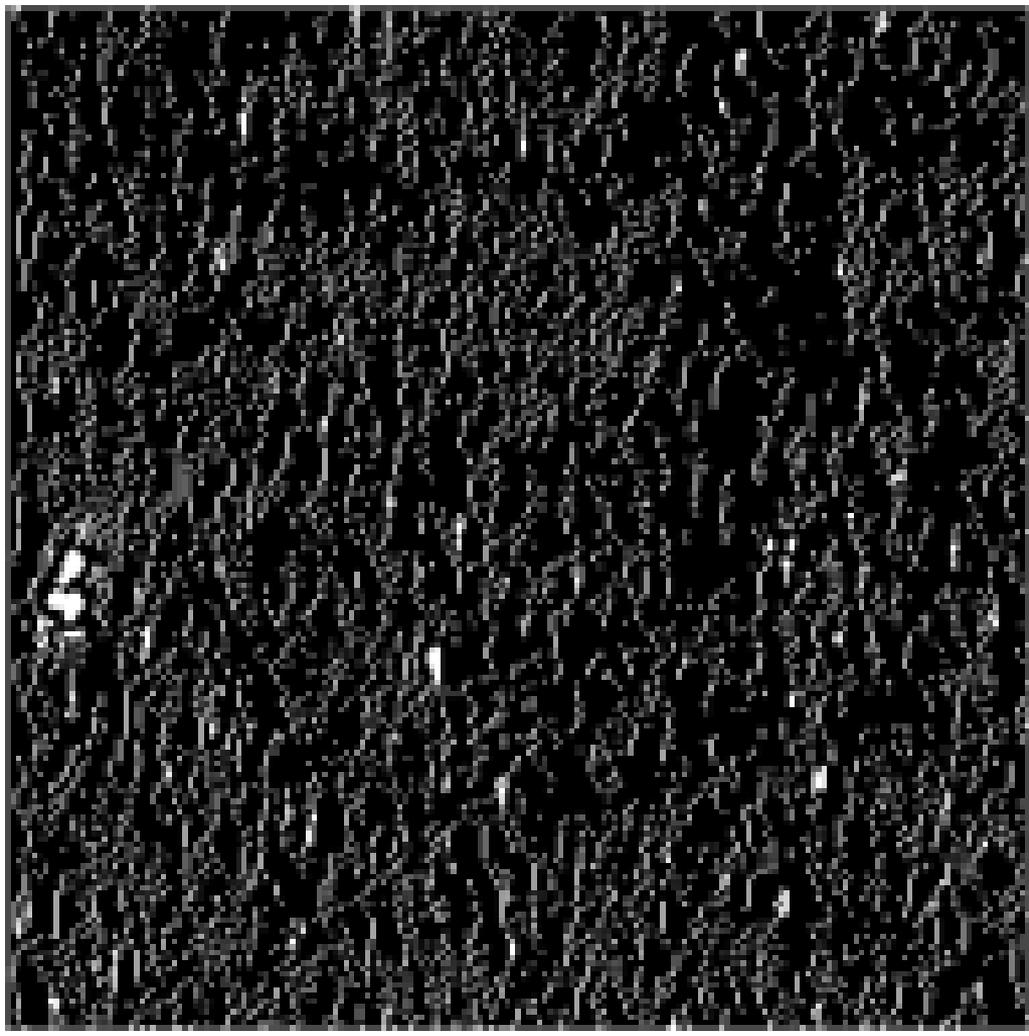
- e. *Key*. Di dalam surat perjanjian kerja yang bersifat legal formal jelas ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa formal. Di dalam ragam bahasa formal maksud dari sebuah tuturan akan diungkapkan secara tegas dan eksplisit. Implikatur yang bermakna 'dimaksudkan tetapi tidak terutarakan' tidak dikenal di dalam bahasa legal formal seperti dalam surat perjanjian kerja.
- f. *Instrument*. Pengungkapan setiap aspek yang dimaksudkan dalam surat perjanjian kerja diwujudkan dengan bahasa tulis. Dengan bahasa tulis tiap aspek yang diklausulkan bisa tersimpan dan dibaca sewaktu-waktu oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja tersebut.
- g. *Norm*. Dalam konteks surat perjanjian kerja aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pihak sudah ada dalam tata tertib atau AD/ART dari perusahaan bersangkutan. Norma atau aturan dari perusahaan juga tunduk pada aturan yang lebih tinggi yaitu dari pemerintah sebagai lembaga yang menaungi perusahaan tersebut.
- h. *Genre*. Bentuk dari peristiwa tutur ini adalah surat perjanjian kerja antara perusahaan sebagai pihak pertama dan pekerja sebagai pihak kedua.

Daftar kode dan senarai data tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Kode Data	Jenis Tindak Tutur
1	D.1	asertif (representatif)
2	D.2	asertif (representatif)
3	D.3	asertif (representatif)
4	D.4	asertif-komisif
5	D.5	deklaratif
6	D.6	asertif (representatif)
7	D.7	komisif
8	D.8	asertif (representatif)
9	D.9	asertif-komisif
10	D.10	asertif-komisif
11	D.11	direktif-komisif
12	D.12	direktif
13	D.13	direktif-komisif
14	D.14	komisif
15	D.15	komisif

16	D.16	asertif-deklaratif
17	D.17	asertif-komisif
18	D.18	asertif (representatif)
19	D.19	deklaratif
20	D.20	direktif
21	D.21	asertif-deklaratif
22	D.22	deklaratif
23	D.23	direktif
24	D.24	asertif-komisif
25	D.25	deklaratif
26	D.26	deklaratif
27	D.27	komisif
28	D.28	direktif
29	D.29	direktif
30	D.30	asertif-deklaratif
31	D.31	asertif-komisif

32	D.32	asertif
33	D.33	direktif
34	D.34	direktif
35	D.35	direktif
36	D.36	direktif
37	D.37	direktif
38	D.38	direktif
39	D.39	direktif
40	D.40	direktif
41	D.41	direktif
42	D.42	direktif
43	D.43	direktif
44	D.44	direktif
45	D.45	direktif
46	D.46	direktif
47	D.47	direktif



48	D.48	direktif
49	D.49	direktif
50	D.50	direktif
51	D.51	direktif
52	D.52	direktif
53	D.53	direktif
54	D.54	asertif-deklaratif
55	D.55	asertif-deklaratif
56	D.56	asertif-deklaratif
57	D.57	asertif-deklaratif
58	D.58	asertif-deklaratif
59	D.59	asertif-deklaratif
60	D.60	asertif-deklaratif
61	D.61	asertif-deklaratif
62	D.62	asertif-deklaratif
63	D.63	asertif-deklaratif

64	D.64	asertif-deklaratif
65	D.65	komisif
66	D.66	asertif-komisif
67	D.67	asertif-komisif
68	D.68	asertif-komisif
69	D.69	direktif
70	D.70	deklaratif
71	D.71	komisif-deklaratif
72	D.72	deklaratif
73	D.73	komisif-deklaratif
74	D.74	asertif
75	D.75	komisif-deklaratif
76	D.76	komisif
77	D.77	deklaratif
78	D.78	asertif-komisif
79	D.79	deklaratif

80	D.80	asertif-deklaratif
81	D.81	deklaratif

3.2 Jenis-Jenis Tindak Tutur dalam Surat Perjanjian Kerja

Dalam konteks surat perjanjian kerja dalam penelitian ini manifestasi tindak tutur yang diwujudkan dalam verba kalimat tidak selalu dapat dikategorikan secara tegas. Beberapa bentuk tindak tutur di dalam surat perjanjian kerja merupakan gabungan dari dua jenis tindak tutur. Gabungan dua jenis tindak tutur tersebut adalah Asertif-Komisif, Direktif-Komisif, Asertif-Deklaratif, dan Komisif-Deklaratif.

3.2.1 Tindak Tutur Deklarasi (*declarations*)

...declarations are those kinds of speech acts that change the world via utterance. 'deklarasi adalah jenis-jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui ujaran'. (Yule: 1996). Sementara Rustono (1999) menyebutkan bahwa tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang dimaksudkan oleh penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dsb.) yang baru. Tuturan-tuturan dengan maksud *mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, dan memaafkan* adalah yang termasuk ke dalam tindak tutur deklarasi (Rustono, 1999: 43).

Data penelitian yang termasuk dalam jenis tindak tutur ini adalah sebagai berikut.

- Perjanjian ini **dibuat dan berlaku** terhitung mulai tanggal... (D.5)
- Pihak Kedua **berhak atas** cuti selama 12 hari kerja ... (D.19)
- Pihak Pertama **dapat memberikan** ijin kepada Pihak Kedua... (D.22)
- Hari dan Jam kerja normal...**akan tunduk** pada ketentuan yang berlaku... (D.25)
- Hari libur di...**adalah** Sabtu dan hari libur resmi... (D.26)
- ...Pihak Kedua **dianggap** tidak masuk kerja tanpa ijin... (D.70)
- ...maka pihak kedua **dianggap mengundurkan** diri. (D.72)
- ...Pihak kedua **tidak diperkenankan** membuka rahasia perusahaan pihak pertama... (D.77)
- Pihak pertama **tidak terikat** pada janji-janji lisan... (D.79)
- Pihak pertama dan pihak kedua **sepakat** untuk membuat perjanjian kerja untuk waktu tertentu... (D.81)

3.2.2 Tindak Tutur Representatif (*representatives*)/Asertif

Tindak tutur representatif ini dinamakan juga dengan tindak tutur asertif. *...are those kinds of speech acts that state what the speaker believes to be the case or not*, 'jenis-jenis tindak tutur yang menyatakan bahwa penutur atau pembicara percaya akan apa yang diutarakannya dengan kata lain tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang telah diujarkan (Rustono, 1999: 40). Yang termasuk dalam tindak tutur ini adalah tuturan *menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, memberikan, kesaksian, dsb.*

pada tuturan "dia yang mencuri sandal di masjid kemarin", si penutur terikat dengan kebenaran isi tuturan yang dia ujkarkan.

Untuk menguji kebenaran tuturan tersebut maka perlu pengetahuan di lapangan bahwa benar-benar dia yang mencuri sandal di masjid itu. Penutur bertanggung jawab terhadap kebenaran isi tuturan. Penutur juga mempercayai isi dari tuturan yang dia ujkarkan. Tuturan representatif ini juga dinamakan dengan tuturan asertif yaitu pernyataan yang diyakini kebenarannya oleh si penutur, misalnya pada tuturan, "Jalan itu rusak parah".

Data penelitian yang termasuk jenis tindak tutur ini adalah sebagai berikut.

- Pihak Pertama **setuju mempekerjakan** Pihak Kedua...(D.1)
- Pihak Pertama **mempekerjakan** Pihak Kedua di proyek...(D.2)
- Tugas pekerjaan yang wajib dikerjakan Pihak Kedua **sesuai** dengan uraian pekerjaan...(D.3)
- Jika diperlukan perjanjian ini **dapat diperpanjang** sesuai dengan ketentuan yang berlaku...(D.6)
- Pihak kedua selain menerima upah...**berhak atas** insentif kehadiran...(D.8)
- Selain yang disebutkan...premi asuransi **ditanggung** oleh Pihak Pertama...(D.18)
- Kerja lembur...**harus mendapatkan** persetujuan pihak pertama...(D.32)
- Perjanjian kerja waktu tertentu ini **berakhir** demi hukum dengan berakhirnya waktu...(D.74)

3.2.3 Tindak Tutur Asertif-Komisif

Bentuk tindak tutur ini tidak hanya mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkannya tetapi juga dapat diartikan oleh lawan tuturnya (dalam hal ini pihak kedua) sebagai sebuah ancaman. Unsur adanya ancaman ini berdasarkan perspektif dari pihak kedua meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tindak tutur komisif.

Data bentuk tindak tutur asertif-komisif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Bila dipandang perlu Pihak Pertama **dapat memberikan** tugas dan pekerjaan di tempat lain...(D.4)
- Pembayaran upah...**akan dibayarkan** oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya...(D.9)
- Pembayaran insentif...**akan dibayarkan** oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada...(D.10)
- Pihak Pertama **akan memberikan** kepada Pihak Kedua...(D.17)
- Ijin meninggalkan...**dapat diberikan** oleh Pihak Pertama setelah...(D.24)
- Upah lembur bulan berjalan **dibayarkan** kepada Pihak Kedua...(D.31)
- Jika Pihak Kedua...Pihak Pertama **berhak memberikan** peringatan terakhir...(D.66)
- ...Pihak Pertama **berhak memutuskan** hubungan kerja...(D.67)
- ...Pihak Pertama **berhak memutuskan** hubungan kerja...tanpa perlu peringatan terlebih dahulu...(D.68)
- ...pihak pertama **berhak menggunakan** segala upaya hukum...(D.78)

3.2.4 Tindak Tutur Direktif (*directives*)

Tindak tutur direktif adalah jenis tuturan untuk membuat orang lain melakukan seperti apa yang dituturkan. Maksud dari tuturan direktif tidak lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dituturkan. Tuturan ini mengungkapkan keinginan dari si penutur melalui tuturannya kepada orang lain. Jenis tuturan ini termasuk *perintah, permintaan, saran, pesan*, dan sebagainya. Tuturan ini bisa berupa tuturan negatif bisa juga positif. Contoh:

- Jangan injak rumput itu!
- Tolong ambilkan tasku!
- Bolehkah aku pinjam uangmu?

Contoh tindak tutur direktif dalam surat perjanjian kerja

- ...Pihak Kedua **harus memberitahukan** rencana perubahan... (D.12)
- Pihak Kedua **harus mengajukan** permohonan...(D.20)
- Ijin meninggalkan...**harus diperoleh** terlebih dahulu... (D.23)
- Pihak Kedua **wajib melaksanakan** pekerjaan tersebut...(D.28)
- Pihak Kedua **wajib melakukan** kerja lembur...(D.29)
- Pihak Kedua **wajib menjaga** kesehatan rohani dan jasmani...(D.33)
- Pihak Kedua **wajib berada** di tempat tugas masing-masing tepat waktu...(D.34)
- Pihak Kedua **wajib mencatatkan** kehadiran...(D.35)
- Pihak Kedua **wajib mengikuti** dan **mematuhi** seluruh petunjuk atau instruksi...(D.36)

- Pihak Kedua **wajib melaksanakan** seluruh tugas...(D.37)
- Pihak Kedua **wajib menunjukkan** prestasi kerja yang baik...(D.38)
- Pihak Kedua **wajib memelihara dan memegang teguh** rahasia perusahaan...(D.39)
- Pihak Kedua **wajib melaporkan** kepada perusahaan...(D.40)
- Pihak Kedua **wajib memeriksa** semua alat-alat kerja...(D.41)
- Pihak Kedua **wajib memelihara dan menjaga** barang-barang, data, dan informasi milik perusahaan...(D.42)
- Pihak Kedua **wajib menjaga** ketertiban, kebersihan, dan keserasian lingkungan kerja...(D.43)
- Pihak Kedua **wajib bekerja** dengan jujur, tertib, cermat, dan penuh kesadaran...(D.44)
- Pihak Kedua **wajib memelihara** dan meningkatkan kekompakan...(D.45)
- Pihak Kedua **wajib menciptakan** suasana kerja yang baik...(D.46)
- Pihak Kedua **wajib memberikan** pelayanan dengan sebaik-baiknya...(D.47)
- Pihak Kedua **wajib berpakaian** rapi dan sopan...(D.48)
- Pihak Kedua **wajib bersikap** dan **bertingkah laku** sopan terhadap...(D.49)
- Pihak Kedua **wajib menolak** setiap pemberian atau janji...(D.50)
- Pihak Kedua **wajib menolak** atau **tidak melakukan** pekerjaan di perusahaan yang sama...(D.51)

- Pihak Kedua **wajib menjaga, memelihara, dan meningkatkan** nama baik Pihak Pertama...(D.52)
- Pihak Kedua **wajib menghindari** perbuatan yang tercela...(D.53)
- ...hal itu **harus dibuktikan** dengan surat keterangan dokter...(D.69)

3.2.5 Tindak Tutur Komisif (*commissives*)

...are those kinds of speech acts that speakers use to commit themselves to some future action. 'jenis-jenis tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkan', misalnya *berjanji, bersumpah, mengancam, menyanggupi*, dan sebagainya.

Pada tuturan "saya sanggup mengerjakannya sendiri", penutur mengikat diri atau berkomitmen untuk dapat melaksanakan apa yang dituturkan pada masa yang akan datang. Karakteristik tuturan komisif ini adalah tindakan yang belum dilakukan atau akan dilakukan di masa yang akan datang.

Data tindak tutur komisif di dalam surat perjanjian kerja adalah sebagai berikut.

- ...Pihak Pertama **akan membayar** upah kepada Pihak Kedua...(D.7)
- Pihak Pertama **akan memberikan** Tunjangan Hari Raya...(D.14)
- Pihak Pertama **akan memberikan** Tunjangan Hari Raya...(D.15)
- Perusahaan **dapat memberikan** sanksi peringatan...(D.65)
- ...maka pihak yang mengakhiri **harus membayar** ganti rugi...(D.76)

3.2.6 Tindak Tutur Direktif-Komisif

Selain bersifat imposisi terhadap pihak kedua yaitu agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan, tindak tutur jenis ini juga menyiratkan makna menyatakan kesanggupan bagi pihak pertama.

Data bentuk tindak tutur direktif-komisif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Pembayaran upah dan insentif...**akan dilakukan** melalui transfer kepada rekening...(D.11)
- Perusahaan **akan memotong, menyetor, dan melaporkan**...(D.13)

3.2.7 Tindak Tutur Asertif-Deklaratif

Selain mengikat penutur (pihak pertama) akan kebenaran atas apa yang dituturkan (ditulis dalam klausul) tindak tutur ini juga dimaksudkan untuk menciptakan status yang baru terkait dengan perjanjian kerja tersebut.

Data penelitian yang termasuk dalam jenis tindak tutur ini adalah sebagai berikut.

- Pekerja yang masa kerjanya kurang...**tidak berhak atas THR**...(D.16)
- Pihak Pertama **tidak akan membayar** cuti tahunan Pihak Kedua...(D.21)
- Perhitungan upah lembur...**berdasarkan** pada peraturan ketenagakerjaan...(D.30)
- Pihak Kedua **dilarang menerima** imbalan baik langsung maupun tidak langsung...(D.54)
- Pihak Kedua **dilarang membawa/menggunakan**...(D.55)

- Pihak Kedua **dilarang menyalahgunakan** wewenangnya...(D.56)
- Pihak Kedua **dilarang membawa** senjata api/tajam ke dalam lingkungan kerja...(D.57)
- Pihak Kedua **dilarang melakukan** tindakan-tindakan sabotase...(D.58)
- Pihak Kedua **dilarang membujuk, menghasut...** agar karyawan tidak masuk kerja...(D.59)
- Pihak Kedua **dilarang meninggalkan** tempat pekerjaan pada waktu jam kerja...(D.60)
- Pihak Kedua **dilarang menulis/mencorat-coret** di lingkungan perusahaan...(D.61)
- Pihak Kedua **dilarang melakukan** pekerjaan yang bukan tugasnya...(D.62)
- Pihak Kedua **dilarang menjual/memperdagangkan** barang-barang apapun...(D.63)
- Pihak Kedua **dilarang tidur** di tempat kerja...(D.64)
- Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini **tunduk** pada peraturan...(D.80)

3.2.8 Tindak Tutur Komisif-Deklaratif

Selain mengikat penuturnya (pihak pertama) untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya, bentuk tindak tutur ini juga dimaksudkan untuk menciptakan hal atau status baru dalam kaitannya dengan perjanjian kerja dengan pihak kedua.

Data penelitian yang termasuk dalam bentuk tindak tutur jenis ini adalah sebagai berikut.

- ...upah Pihak Kedua **dikurangi** sebesar...(D.71)
- ...maka pihak pertama **berhak memutuskan** hubungan kerja dengan pihak kedua tanpa...(D.73)
- Pihak kedua **tidak berhak memperoleh** uang pesangon...pada saat perjanjian ini berakhir...(D.75)

3.3 Fungsi Tindak Tutur Dalam Surat Perjanjian Kerja

Fungsi tindak tutur yang terdapat pada surat perjanjian kerja meliputi fungsi direktif, asertif (representatif), komisif, deklaratif, asertif-komisif, direktif-komisif, asertif-deklaratif, dan komisif-deklaratif. Fungsi direktif menempati urutan pertama dalam hal jumlah kemunculan di dalam surat perjanjian kerja (27 kali), setelah itu tindak tutur asertif-deklaratif sebanyak 15 kali. Berikutnya adalah bentuk tindak tutur deklaratif dan asertif-komisif sama-sama muncul sepuluh kali disusul kemudian oleh tindak tutur asertif yakni sebanyak delapan kali kemunculan. Urutan berikutnya adalah tindak tutur komisif sebanyak enam kali dan kemudian komisif-deklaratif sebanyak tiga kali dan terakhir adalah direktif-komisif sebanyak dua kali.

Dominannya fungsi tindak tutur direktif di dalam surat perjanjian kerja jelas menunjukkan bahwa sifat tuturannya banyak yang bersifat imposisi atau 'memaksa' sehingga dalam konteks ini pihak kedua (pekerja) mau tidak mau, suka atau tidak suka ya harus tunduk pada ketentuan (tuturan) yang ada dan sudah

dipersiapkan sebelumnya. Indikator imposisinya bisa dilihat dari pemakaian kata-kata 'wajib' dan 'harus' pada fungsi predikat kalimatnya. Dengan demikian dapat dikategorikan sebagai eksplisit performatif yaitu jelas disebutkan apa yang harus dilakukan oleh mitra tutur sesuai dengan apa yang dituturkan.

Fungsi tindak tutur ekspresif tidak muncul di dalam surat perjanjian kerja karena bahasa dalam surat formal adalah bahasa yang tegas dan eksplisit. Makna tuturan dalam surat perjanjian tidak melibatkan rasa karena lebih bersifat imposisi, memaksa. Tidak ada pilihan lain bagi pihak kedua selain harus tunduk dan mengikuti aturan (tuturan) yang sudah ada.

Terkait dengan larangan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua maka fungsi tindak tutur deklaratif juga banyak muncul dalam bahasa di surat perjanjian kerja. Hal ini disebabkan pihak pertama ingin memberikan rambu-rambu kepada pihak kedua agar tidak dilanggar jelasnya untuk kepentingan perusahaan.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Penelitian mengenai jenis-jenis tindak tutur pada dokumen surat perjanjian kerja di Perusahaan Tri Patra memasuki tahap akhir yaitu simpulan. Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab III, dapat ditarik suatu simpulan bahwa semua jenis tindak tutur kecuali jenis tindak tutur ekspresif ditemukan dalam surat perjanjian kerja. Jenis-jenis tindak tutur tersebut adalah tindak tutur representatif (asertif), tindak tutur komisif, tindak tutur direktif, dan tindak tutur deklaratif. Selain keempat jenis tindak tutur tersebut ditemukan juga jenis tindak tutur gabungan yaitu tindak tutur asertif-komisif, tindak tutur direktif-komisif, tindak tutur asertif-deklaratif, dan tindak tutur komisif-deklaratif. Jenis tindak tutur yang paling banyak ditemukan dalam surat perjanjian kerja ini adalah jenis tindak tutur direktif (27) kemudian diikuti oleh asertif-deklaratif (15), deklaratif (10), asertif-komisif (10), asertif (8), komisif (6), komisif-deklaratif (3), dan direktif-komisif (2). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jenis tindak tutur yang paling banyak terdapat dalam surat perjanjian kerja adalah tindak tutur yang bersifat imposisi atau memaksa selain sifat lainnya yaitu melarang dan mengancam secara tidak langsung.

Hasil ini menunjukkan bahwa bahasa yang terdapat dalam surat perjanjian kerja bersifat formal dan legal sehingga tidak dimungkinkan munculnya jenis tindak tutur yang bersifat ekspresif.

4.2 SARAN

Penelitian mengenai jenis-jenis tindak tutur pada surat perjanjian kerja di perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro ini hendaknya dapat dikembangkan lebih luas lagi tidak hanya pada identifikasi bentuk-bentuk tindak tutur dan fungsinya tetapi dapat dilakukan penelitian aspek-aspek pragmatik lainnya yang pembahasannya lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Elizabeth. 2011. *Stilistika Pragmatis* (Terjemahan dari judul asli *Pragmatic Stylistics*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Brown, Penelope and Stephen C. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. New York: Cambridge University Press
- Cummings, Louise. 2007. *Pragmatik* (Terjemahan dari judul asli *Pragmatics: A Multidisciplinary Perspective*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. *Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Carasvatibooks
- Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: CV Ikip Semarang Press
- Mahsun. 2007. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sapsford, Roger & Victor Jupp. 2006. *Data Collection And Analysis: Second Edition*. London, California, New Delhi: SAGE Publications Ltd.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press
- Verhaar, J.W.M. 2008. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kridalaksana, Harimurti. 2004. *Kamus Linguistik, Edisi 4*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Alwi, Hasan, dkk. 2000. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.